



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH LAKIP TAHUN 2025**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN JEMBER**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2024.

Jember, 14 Februari 2025  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya  
Kabupaten Jember



Ir. Rahman Anda, S.T., M.T., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770524 200212 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI .....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA .....	7
E. SARANA PRASARANA.....	10
F. ANGGARAN DINAS .....	15
G. ISU STRATEGIS .....	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	22
A. RENCANA STRATEGIS.....	22
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	25
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	32
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024 .....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	35
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 .....	35
B. CAPAIAN KINERJA.....	36
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN .....	41
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	69
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN.....	70
F. REALISASI ANGGARAN.....	74
BAB IV PENUTUP.....	80
LAMPIRAN	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2024

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yaitu :

***Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik***

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1** : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indicator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator dengan capaian tergolong **Sangat Tinggi**, 1 (satu) indikator tergolong **Tinggi**
- Sasaran 2** : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan mendapat predikat nilai **Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indicator sasaran, dengan capaian 1 (satu)

indikator tergolong **Sangat Tinggi**, 1 (satu) indikator tergolong **Tinggi**

**Sasaran 3** : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian tergolong **Sangat Tinggi**

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 5 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Tinggi**, 2 indikator capaiannya **Tinggi**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 74% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 150.703.146.229,- dan Belanja Modal sebesar 26% atau sebesar Rp 53.341.487.685,-

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 181.868.317.882 atau 89,13% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata tercapai kinerja sebesar 85% dengan serapan anggaran 54,78% , Sasaran 2 Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan tercapai kinerja 100% dengan serapan anggaran 92% dan Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak tercapai kinerja sebesar 95,48% dengan serapan anggaran 88,93%.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Hambatan dan Permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata yaitu :
  - a. Masyarakat yang kurang teredukasi tentang penggunaan aplikasi SIMBG dalam pengajuan PBG dan SLF.
  - b. Kurangnya Monitoring ataupun pengawasan terhadap kesesuaian izin pendirian bangunan.
  - c. Pelayanan air minum non perpipaan sebagian besar di perdesaan belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.
  - d. Berkurangnya debit air dikarenakan banyaknya pembangunan perumahan.
  - e. Terbatasnya sumber air baku di beberapa daerah.
  - f. Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.
  - g. Masih terdapat dan kurang teredukasinya masyarakat yang mempunyai habit BABS (Buang Air Besar Sembarangan).
  - h. Belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.
2. Hambatan dan Permasalahan pada Sasaran Strategis Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, yaitu :
  - a. Belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Jember sebagai dokumen integrasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
  - b. Kurangnya pemanfaatan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
3. Hambatan dan Permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak, yaitu :
  - a. Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni.

- b. Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman sehingga menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
- c. Terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di desa tertinggal di Kabupaten Jember

Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman di Kabupaten Jember terdapat beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Solusi Perbaikan untuk permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata, yaitu :
  - a. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat melalui Kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
  - b. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Pelayanan Air Minum dan peran serta seluruh Stake holder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dipekotaan dan diperdesaan.
  - c. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber air baku.
  - d. Meningkatkan kualitas IPLT sebagai pengelolaan air limbah.
  - e. Menciptakan iklim yang kondusif untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air limbah yang layak untuk masyarakat.
  - f. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan).
2. Solusi Perbaikan untuk permasalahan pada Sasaran Strategis Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, yaitu :
  - a. Percepatan Penetapan Perda RTRW Kabupaten Jember.
  - b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui konsultasi publik.

3. Solusi Perbaikan untuk permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak, yaitu :
  - a. Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
  - b. Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana dan prasarana di kawasan permukiman sehingga kualitas lingkungan permukiman meningkat dan luasan kawasan kumuh berkurang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis

sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2024

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 30 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan di bidang Pertanahan.

- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan
- (4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang;
  - b. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari sub urusan perumahan, sub urusan kawasan permukiman, sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sub urusan sarana, prasarana dan utilitas umum, sub urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program pertanahan;
  - d. Pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Kawasan perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Kawasan perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
  - f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi serta tugas pembantuan

(5) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember terdiri dari :

a. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
3. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat, mempunyai fungsi :
  - i. Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
  - ii. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
  - iii. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
  - iv. Penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
  - v. Penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
  - vi. Pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;
  - vii. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas;
  - viii. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
  - ix. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  - x. Pengelolaan kearsipan dinas; dan
  - xi. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

- b. Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai fungsi meliputi :
- i. Perumusan kebijakan teknis bangunan Gedung, Penataan Bangunan, Jasa Konstruksi;
  - ii. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penataan bangunan dan lingkungan, serta penyusunan peraturan dan standarisasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
  - iii. Pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar pelaksanaan dan keamanan bangunan;
  - iv. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara;
  - v. Pelaksanaan pembinaan teknis serta fasilitasi penataan kawasan, Penyediaan, Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Perumahan dan Permukiman;
  - vi. Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi;
  - vii. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
  - viii. Pengkoordinasian kebijakan teknis tata bangunan dan jasa konstruksi; dan
  - ix. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; mempunyai fungsi meliputi :
- i. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum;
  - ii. Pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Non Hijau publik dan fasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau non publik;
  - iii. Pelaksanaan penyediaan fasilitas taman kota dan pemeliharannya;
  - iv. Perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemakaman umum;

- v. Pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perawatan dan pengendalian infrastruktur permukiman termasuk penerangan permukiman perdesaan, penerangan jalan umum, jalan lingkungan dan kelengkapannya, tempat sampah dan infrastruktur permukiman lainnya;
  - vi. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman;
  - vii. Pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) termasuk peningkatan akses air minum yang sesuai standar kualitas;
  - viii. Pembinaan kebijakan, Perencanaan dan Pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan Instalasi Pengelolaan Air limbah Tinja (IPLT);
  - ix. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- d. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi:
- 1. Seksi Pertanahan; dan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
  - 3. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi meliputi :
    - i. Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang;
    - ii. Koordinasi pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
    - iii. Koordinasi dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
    - iv. Pelaksanaan pengawasan penataan ruang yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
    - v. Koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan penataan ruang;
    - vi. Fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa atau konflik tanah; dan
    - vii. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 85 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 349 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 264 orang atau 75.64%.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Tahun 2024**

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada							L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				1	1						1	1	
Jabatan Administrasi														
1. Administrator														
Sekretaris	1			1		1						1	1	
Ka. Bid. Jasa Konstruksi, Penata Bangunan Perumahan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1			1		1					1		1	

Ka. Bid. Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum	1			1	1				1		1	
Ka.Bid. Tata Ruang Dan Pertanahan	1			1	1					1	1	
2. Pengawas												
Ka.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	1			1	1				1		1	
Ka.Sub. Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan	1			1	1				1		1	
Kepala Seksi Pertanahan	1			1	1				1			1
3. Pelaksana												
Penelaah Teknis Kebijakan	11			11	0							
Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	1			1	1				1		1	
Pengolah Data dan Informasi	6			6	0							
Pengadministrasi Perkantoran	18	18			12		12				8	4
Operator Layanan Operasional	180	180			20		19		1		20	
Operator Layanan Operasional (Petugas Keamanan)	9	9			9		9				9	
Operator Layanan Operasional (Pramu Bakti)	2	2			2		2				2	
Penata Layanan Operasional	17			17	2				1	1	2	
Pengelola Layanan Operasional	3	3			0							
Pengawas Jaringan Utilitas	1			1	0							
Penata Layanan Operasional	7			7	0							
Operator Layanan Operasional (Pramu Pemakaman)	2	2			2		2				2	
Operator Layanan Operasional (Pramu Taman)	20	20			18		18				18	
Pengelola Umum Operasional	35	35			0							

Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	3			3		0							
<b>Jabatan Fungsional</b>													
JF Teknik Tata bangunan dan Perumahan Madya (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya)	4			4		0							
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya (Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya)	2			2		0							
JF Penata Ruang Ahli Madya	2			2		0							
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	1			1		1				1		1	
JF Perencana Ahli Pertama	2			2		1				1			1
JF Analisis SDM Aparatur Pertama	1			1		0							
JF Teknik Tata bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda)	3			3		3				3		2	1
JF Teknik Tata bangunan dan Perumahan Ahli Pertama (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama)	2			2		1				1			1
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	2			2		0							
JF Teknik Tata bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Penata Kelola Bangunan	1			1		1				1		1	

Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda)														
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Muda)	2			2		2					2		2	
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama (Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Pertama)	2			2		0								
JF Penata Ruang Muda	2			2		2					2		1	1
Non ASN						222	13	10	158	6	35		202	20
Jumlah	349	269	0	79	1	307	13	41	189	6	54	4	278	29

**Sumber :** Data Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

#### **E. SARANA PRASARANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Srikoyo I/1 Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember Cukup memadai. Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Profil Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember  
Per 31 Desember 2024**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	<b>KIB A (TANAH)</b>			
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	B	2
	<b>KIB B (PERALATAN DAN MESIN)</b>			
	Mesin Proses			
	- Toilet Portabel	8	KB	8
	- IPLT	1	R	1
	Elektrik Generating Set			
	- Genset	2	B	2
	Pompa			
	- Pompa Air	6	B	10
		4	KB	
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
	- Station Wagon	5	B	6
		1	KB	
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
	- Truck + Attachment (Dump Truck)	2	B	2
	- Pick Up	1	B	6
		3	KB	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
	- Sepeda Motor	32	B	41
		3	KB	
		6	R	
	Kendaraan Khusus			
- Mobil Tinja	3	B	4	
	1	KB		
- Mobil Tangki Air	2	B	2	
- Kendaraan Toilet	1	B	2	

- Truck Tangga PJU	3	B	5
	2	KB	
- Sepeda Motor Roda 3	6	B	11
	3	KB	
	2	R	
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
- Caravan Bermotor	3	KB	3
Perkakas Bengkel Kayu			
- Gergaji senso	32	B	36
	4	KB	
Alat Ukur universal			
- Deciblemeter	3	B	3
- Meteran dorong digital	30	B	66
	21	KB	
	15	R	
- GPS	18	B	
- alat ukur sigmat	2	B	2
- meteran gulung 100 m	3	B	5
	2	KB	
Universal Tester			
- Alat Tes Paving (Stamper)	2	KB	2
Alat Ukur lainnya			
- Alat Ukur berat beton ( Timbangan 20	2	KB	2
Alat Penggandaan			
- Mesin Fotocopy	1	B	4
	3	KB	
Alat Penyimpanan Kantor			
- Lemari Besi	30	B	50
	12	KB	
- Lemari Kayu	8	B	10
- Felling Kabinet besi	20	B	30
- Brankas	1	B	1
- Lemari Kaca	10	B	15
Alat Kantor Lainnya			
- Camera CCTV	25	B	25
- Alat Penghancur Kertas	3	B	15
	7	KB	

	2	R	
- Laser Point	4	B	4
- Meja Piket	1	B	1
- Kursi Tunggu Tamu	5	B	5
- Kompresor Angin	1	B	1
- GPS geodetic	1	B	1
Meubeler			
- Meja Kerja Staf	83	B	129
- Kursi Kerja Staf	129	B	129
- Meja rapat Ruangan Kepala Dinas	1	B	1
- Meja rapat Ruangan Aula	2	B	2
- Kursi Rapat Ruangan Kepala Dinas	7	B	16
- Kursi Rapat Ruangan Aula	46	B	46
- Meja Kursi Tamu 1 set	3	B	3
Alat Pembersih			
- Alat Penghisap debu(Vacumcleaner)	1	KB	1
- Mesin Potong Rumput	13	B	13
	6	R	
- Mobil Pemotong Rumput	1	B	1
Alat Pendingin			
- Kulkas	4	B	4
- AC	20	B	20
- Room Airfuiere	2	B	3
Alat Rumah Tangga Lainnya			
- Televisi	14	B	14
- Sound System	5	B	5
- Microfon Meja rapat	6	B	6
- Microfon Standing	2	B	2
- Mic Confrence	1	B	1
- Camera Digital	11	B	11
- Dispenser	4	B	4
- Proyektor	3	B	3
- Tangga Lipat	1	B	1
- Tandon air	1	B	1
Alat Pemadam Kebakaran			
- Alat Pemadam Portable	1	B	10
Meja Kerja Pejabat			

- Meja Kerja Pejabat Kepala Dinas	1	B	1
- Meja Kerja Sekretaris Dinas	1	B	1
- Meja Kerja Eselon 3	3	B	3
- Meja Kerja Eselon 4	11	B	11
Kursi Kerja Pejabat			
- Kursi Kerja Pejabat Kepala Dinas	1	B	1
- Kursi Kerja Sekretaris Dinas	1	B	1
- Kursi Kerja Eselon 3	3	B	3
- Kursi Kerja Eselon 4	11	B	11
Lemari dan Arsip Pejabat			
- Lemari Buku Arsip	2	B	2
Peralatan Studio, Video dan Film			
- Camera Confrence	2	B	2
Peralatan Studio Pemetaan			
- Drone	7	B	7
Alat Telekomunikasi Telepon			
- Handy Talky (HT)	14	B	14
- Faximile	1	B	1
Alat Laboratorium Bahan Bangunan dan Konstruksi			
- Alat pemeriksa beton (Untuk Gedung)	2	B	2
Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan			
- Stamper Kodok	2	B	2
Personal Komputer			
- PC Unit	38	B	38
- Laptop/Notebook	82	B	111
	29	KB	
- Tablet PC	10	B	10
Peralatan Main Frame			
- Hardisk	11	B	11
Peralatan Personal Komputer			
- Printer	84	B	121
	37	KB	
- Scanners	21	B	21
- UPS	13	B	21
	8	KB	
Peralatan Jaringan			

- Jaringan PABX	1	KB	1
<b>KIB C (BANGUNAN DAN GEDUNG)</b>			
Bangunan Gedung dan Kantor			
- Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	B	2
- Tandon Air	1	B	1
- Parkir	1	B	1
- Pagar	1	B	1
Bangunan Gudang			
- Gudang Tertutup Permanen	1	B	1
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			
- Gedung Aula/Gedung Rapat	1	B	1
<b>Jumlah</b>	<b>321</b>		<b>275</b>

**Sumber Data** : Kartu Inventaris Barang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember Tahun 2024

#### **F. ANGGARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember memiliki 9 Program, 18 Kegiatan, dan 36 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp204.044.633.914,00 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember**  
**Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp,-)</b>
1	<b>Program</b> penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp63.580.347.272
1.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp292.038.571
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp292.038.571

1.2	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp10.391.576.403
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp9.569.486.283
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp604.145.150
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp217.944.970
1.3	<b>Kegiatan</b> Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp107.444.115
	<b>Sub Kegiatan</b> Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp107.444.115
1.4	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp1.700.845.851
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp31.489.923
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp833.330.519
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp579.495.647
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp55.449.950
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp201.079.812
1.5	<b>Kegiatan</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp49.039.800
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp49.039.800
1.6	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp48.497.474.304
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp40.329.544.684
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp173.750.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp7.994.179.620
1.7	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.541.928.228
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp94.952.128

	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp2.026.959.535
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp319.841.755
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp100.174.810
2.	<b>Program</b> Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp8.880.323.656
2.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.880.323.656
	<b>Sub Kegiatan</b> Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Rp452.112.796
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Rp725.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Rp4.182.049.697
	<b>Sub Kegiatan</b> Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Rp3.521.161.163
3.	<b>Program</b> Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp8.566.928.170
3.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.566.928.170
	<b>Sub Kegiatan</b> Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPLT	Rp40.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rp371.230.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Setempat	Rp8.155.698.170
4.	<b>Program</b> Penataan Bangunan Gedung	Rp12.150.302.000
4.1	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp12.150.302.000

	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.446.700.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp1.703.602.000
5.	<b>Program</b> Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp961.620.770
5.1	<b>Kegiatan</b> Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang RRTR Kabupaten/Kota	Rp721.107.110
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Rp721.107.110
5.2	<b>Kegiatan</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp150.153.950
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp150.153.950
5.3	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp90.359.710
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp90.359.710
6.	<b>Program</b> Pengembangan Perumahan	Rp500.000.000
6.1	<b>Kegiatan</b> Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp500.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b> pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp500.000.000
7.	<b>Program</b> Kawasan Permukiman	Rp5.470.407.00
7.1	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp255.667.095
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Rp255.667.095
7.2	<b>Kegiatan</b> Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp5.214.739.905

	<b>Sub Kegiatan</b> Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp4.550.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp664.739.905
8.	<b>Program</b> Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Psu	Rp103.847.775.816
8.1	<b>Kegiatan</b> Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp103.847.775.816
	<b>Sub Kegiatan</b> penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp103.847.775.816
9.	<b>Program</b> Penatagunaan Tanah	Rp86.929.230
9.1	<b>Kegiatan</b> Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp86.929.230
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp86.929.230
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp204.044.633.914</b>

*Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember Tahun 2024*

## G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabuapten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
2. Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan

3. Mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana
4. Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi khususnya di kawasan strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air
5. Masih terdapat daerah-daerah yang terdampak kekeringan terutama di musim kemarau. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk dapat mengentaskan persoalan penyediaan air bersih dimasyarakat. Berkerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melakukan pengentasan permasalahan air minum.
6. Belum Optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi secara regional
7. Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku untuk berbagai kepentingan
8. Kecepatan pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi belum dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
9. Kebutuhan pokok minimal manusia akan air bersih adalah 60 liter/orang/hari. Hal tersebut harus didukung oleh SPAM perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi (sesuai dengan standar teknis yang berlaku)
10. Perluasan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana air minum dan sanitasi
11. Optimalisasi pemanfaatan air minum regional dalam rangka pencapaian target SPM untuk sector Air Minum dan Sanitasi.
12. Pergeseran pusat kegiatan lokal wilayah di Jember
13. TPA yang belum memadai dan belum memiliki pengelolaan yang baik
14. Perubahan luasan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun yang signifikan, khususnya lahan pertanian dan hutan lindung
15. Belum adanya kesepakatan luasan lahan untuk LP2B sebagai salah satu substansi dalam Revisi RTRW
16. Belum ada kejelasan mekanisme insentif yang diterima petani terkait penetapan lahan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
17. Kawasan rawan bencana likuifaksi di wilayah selatan Jember
18. Ditemukannya lokasi potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata baru
19. Reforma Agraria (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal

20. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
21. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic
22. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
23. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: ***“Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember.”*** Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember yaitu :

**Misi :**

Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang merata di semua wilayah jember

**Tujuan RPJMD :**

Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata serta berperspektif kebencanaan

**Sasaran RPJMD :**

- Sasaran 1 : Meningkatnya sarana permukiman masyarakat yang berkualitas dan merata
- Sasaran 2 : Meningkatnya utilitas permukiman masyarakat berkualitas dan merata

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat,**  
**Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik

Indikator Tujuan 1 :

Persentase capaian pelayanan infrastuktur dasar perumahan dan permukiman

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi			96%	97%	98%	99%
	2. Persentase rumah tangga berakses air Minum			81%	84%	87%	90%
	3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman			84%	86%	88%	90%
Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang			84%	91%	96%	100%
	2. Prosentase Penata gunaan tanah			50%	64%	72%	80%
Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani			202,9 Ha	150,8 Ha	124 Ha	100 Ha
	2. Persentase rumah layak huni			91%	92%	93%	94%

**Sumber Data** : Kertas Kerja TC 25 Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya tahun 2021-2026

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi (jumlah bangunan yang sudah ber PBG dan SLF)}}{\text{Jumlah Bangunan Gedung yang mengajukan izin PBG dan SLF}} \times 100$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>1. Standar teknis konstruksi adalah serangkaian pedoman dan ketentuan teknis yang digunakan untuk memastikan bahwa</p>	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Data Register Bangunan gedung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan konstruksi dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan fungsi bangunan atau infrastruktur yang direncanakan. Standar ini mencakup aspek keselamatan, kualitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Standar teknis konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung</p> <p>2. PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PBG diterbitkan berdasarkan <b>pemenuhan standar teknis bangunan gedung</b> dan kesesuaian dengan <b>rencana tata ruang</b>.</p> <p>3. SLF adalah sertifikat laik fungsi. pemenuhan <b>sertifikat laik fungsi (SLF)</b> setelah konstruksi selesai sebagai bukti bahwa bangunan memenuhi standar Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p>		Cipta Karya
		2. Persentase rumah tangga berakses air Minum	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki sarana air minum}}{\text{Jumlah KK di Kab Jember}} \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KK yang memiliki sarana air minum adalah KK yang dapat mengkases air minum melalui sarana langsung di Rumah. Berpedoman pada permenpupr No. 13 Tahun 2023.</li> <li>2. Sarana air minum meliputi semua infrastruktur, peralatan dan sistem yang digunakan untuk menyediakan air minum yang layak dan aman kepada masyarakat. Sarana air minum meliputi: Sumber air, instalasi pengelolaan air, sistem distribusi jaringan pipa, pompa air, bangunan dan struktur yang digunakan untuk mendukung pengelolaan instalasi air, tangki penyimpanan dan infrastruktur lainnya.</li> </ol>		Cipta Karya
		3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Jumlah KK bersanitasi layak}}{\text{Jumlah KK penduduk Jember}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KK yang bersanitasi layak adalah KK yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ SistemTerpusat.</li> </ol>	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>2. Adapun kriteria sanitasi layak yaitu : Jamban sehat harus tertutup dinding dan atap, Saluran pembuangan air kotor yang ada di dapur atau tempat cuci dialirkan menuju selokan atau saluran kota, Saluran pembuangan air dari kloset langsung dialirkan menuju septic tank, Posisi septic tank harus lebih rendah dari kloset agar kotoran mudah masuk ke dalamnya. Selain itu memiliki saluran udara agar septic tank tidak meledak.</p> <p>3. Berpedoman pada permenpupr No. 13 Tahun 2023.</p>		
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Tata Ruang Wilayah}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut.</li> <li>2. Berpedoman pada Perda RTRW Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember.</li> <li>3. Realisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merujuk pada implementasi atau pelaksanaan rencana tata ruang yang telah disusun oleh pemerintah daerah</li> </ol>	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Persentase Penatagunaan Tanah	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Jumlah sertifikat hak milik (SHM)}}{\text{Jumlah bidang Tanah}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan penuh atas tanah dan/atau bangunan. Di dalam SHM, terdapat keterangan nama pemilik, luas tanah, lokasi properti, gambar bentuk tanah, nama objek atau tetangga pemilik tanah yang berbatasan langsung, tanggal penetapan sertifikat, nama dan tanda tangan pejabat yang bertugas, serta cap stempel sebagai bukti keabsahan sertifikat.</li> <li>2. SHM hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.</li> </ol>	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1 Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> <p>Jumlah Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertangani</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni</li> </ol>	1. Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat</p> <p>2. Perumahan dan permukiman kumuh yang tertangani adalah perumahan yang sudah meningkat kualitas fungsi sebagai tempat hunian.</p> <p>Berpedoman pada Permen PUPR No. 14 /PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh</p>	<p>gan Kawasan</p> <p>2. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</p>	
		<p>2 Persentase rumah layak huni</p>	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak huni}}{\text{Jumlah bangunan Rumah}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>1. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.</p> <p>2. Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yakni : Keselamatan bangunan meliputi: struktur bawah/pondasi; struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas. Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi. Kecukupan luas minimum 7,2 m<sup>2</sup> – 12 m<sup>2</sup> /orang.</p>	<p>Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan</p>	<p>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			3. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Perumahan dan Permukiman.		

**Sumber Data** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Pada perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2024, target yang dicantumkan sesuai dibandingkan target yang tercantum pada renstra.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	➤ Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	97 %
		➤ Persentase rumah tangga berakses air Minum	84 %
		➤ Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	86 %
2.	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	➤ Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	91 %
		➤ Prosentase Penatagunaan tanah	64 %
3.	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	➤ Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	150,8 ha
		➤ Persentase rumah layak huni	92 %
		➤ Peringkat/Juara dalam Penyediaan Perumahan dari Direksi Teknis Pengawas Lapangan dan Percepatan Aset PSU	1 Penghargaan

*Sumber Data : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember tahun 2024*

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 63.580.347.272,-	APBD
2.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 8.880.323.656,-	APBD
3.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 8.566.928.170,-	APBD
4.	Penataan Bangunan Gedung	Rp. 12.150.302.000,-	APBD
5.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 961.620.770,-	APBD
6.	Pengembangan Perumahan	Rp. 500.000.000,-	APBD
7.	Kawasan Permukiman	Rp. 5.470.407.000,-	APBD
8.	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 103.847.775.816,-	APBD
9.	Penatagunaan Tanah	Rp. 86.929.230,-	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 204.044.633.914,-</b>	

#### **D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024**

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata

Didukung oleh :

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Anggaran Rp.8.880.323.656
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Anggaran Rp.8.566.928.170
- Program Penataan Bangunan Gedung dengan Anggaran Rp.12.150.302.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.29.597.553.826 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 14,51% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember

b) Sasaran Strategis II : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Anggaran Rp. 961.620.770
- Program Penatagunaan Tanah dengan Anggaran Rp.86.929.230

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.1.048.550.000 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 0,51% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember

c) Sasaran Strategis III : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak

Didukung oleh :

- Program Pengembangan Perumahan dengan Anggaran Rp.500.000.000
- Program Kawasan Permukiman dengan Anggaran Rp.5.470.407.000
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan Anggaran Rp.103.847.775.816

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp109.818.182.816 yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 53,82% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

**Sumber Data** : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7*100%)
1	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	97 %	93%	95,8%	99%	93%
		2. Persentase rumah tangga berakses air Minum	84 %	97,3%	115%	90%	107%
		3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	86 %	84,19%	97%	90%	93,5%

2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	91 %	92%	101 %	100%	92 %
		2. Prosentase Penatagunaan tanah	64 %	78%	121%	80%	97,5%
3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	150,8 ha	211,65 ha	110%	0 ha	36,63%
		2. Persentase rumah layak huni	92 %	96%	104%	94%	102 %
		3. Peringkat/Juara dalam Penyediaan Perumahan dari Direksi Teknis Pengawas Lapangan dan Percepatan Aset PSU	1 Penghargaan	0 Penghargaan	0%	0	0 %

**Sumber Data Realisasi** : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 8 indikator sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember rata rata mencapai 72,14% dan masuk dalam **kategori tinggi** Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan Capaian sudah memenuhi target yang telah ditentukan dengan rata-rat capaian sebesar 73,12%. Dengan demikian maka secara umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan Rakyat dan bidang Pertanahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata	Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	-	-	90%	93%
	Persentase rumah tangga berakses air Minum	83,43%	90,22%	91%	97,3%
	Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	80%	81,93%	87,74%	84,19%
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	86%	77%	85%	92%
	Prosentase Penatagunaan tanah	-	-	70%	78%
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	71,61 ha	674,94 ha	10 ha	211,65 ha
	Persentase rumah layak huni	55,12%	94%	95%	96%
	Peringkat/Juara dalam Penyediaan Perumahan dari Direksi Teknis Pengawas Lapangan dan Percepatan Aset PSU	-	-	-	0 Penghargaan

**Sumber Data Realisasi:** Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata mempunyai 3 indikator kinerja, yaitu :

1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2023 s.d 2024. Pada Tahun 2021 dan 2022 indikator tersebut tidak masuk dalam Indikator Perjajian Kinerja maupun dalam Renstra DPRKPK tahun 2021-2026 sehingga target dan capaian tidak dapat direalisasikan. Dengan adanya perubahan Renstra DPRKPK 2021-2026 indikator Prosentase

bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi dijadikan Indikator Kinerja pada tahun 2023, sehingga Renstra Perubahan DPRKPCCK 2021-2026 dengan Pekerjaan Kinerja 2023 menjadi selaras dan dapat direalisasikan. Peningkatan realisasi dari tahun 2023 s.d 2024 tersebut dapat terjadi dikarenakan edukasi tentang penggunaan aplikasi SIMBG dalam pengajuan PBG dan SLF meningkat serta meningkatnya monitoring ataupun pengawasan terhadap kesesuaian izin pendirian bangunan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.

2. Persentase rumah tangga berakses air Minum

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024. Hal ini dikarenakan kegiatan pembangunan SPAM yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah berupaya menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Jember sehingga masyarakat yang memiliki akses terhadap fasilitas air bersih serta sistem penyediaan air bersih pun meningkat setiap tahunnya. Peningkatan realisasi tersebut juga terwujud dari meningkatnya jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau.

3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2023. Akan tetapi, realisasi mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini dikarenakan Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan

1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2022 s.d 2024. Hal ini dikarenakan meningkatnya pemanfaatan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sehingga kesesuaian rencana tata ruang pun meningkat.

2. Prosentase Penatagunaan tanah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2023 s.d 2024. Pada Tahun 2021 dan 2022 indikator tersebut tidak masuk dalam Indikator Perjajian Kinerja maupun dalam Renstra DPRKPCK tahun 2021-2026 sehingga target dan capaian tidak dapat direalisasikan. Dengan adanya perubahan Renstra DPRKPCK 2021-2026 indikator Prosentase Penatagunaan tanah dijadikan Indikator Kinerja pada tahun 2023, sehingga Renstra Perubahan DPRKPCK 2021-2026 dengan Pekerjanjian Kinerja 2023 menjadi selaras dan dapat direalisasikan. Peningkatan realisasi dari tahun 2023 s.d 2024 tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya sengketa tanah yang terdaftar sudah dalam proses penyelesaian.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak

1. Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2023. Hal ini dikarenakan meningkatnya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan yang memadai dan permukiman sehingga lebih meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pada akhirnya menurunkan luasan kawasan kumuh. Pada tahun 2024 ditetapkan SK Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jember Tahun 2024 dengan luasan 577,7 ha yang terdiri dari 32 Kawasan di 5 Kecamatan. Luasan kumuh yang ditetapkan tersebut sudah tertangani sebesar 211,65 ha pada tahun 2024 dengan capaian 121%.

2. Persentase rumah layak huni

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024. Hal ini dikarenakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya dalam rangka peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

3. Peringkat/Juara dalam Penyediaan Perumahan dari Direksi Teknis Pengawas Lapangan dan Percepatan Aset PSU

Pada Tahun 2021 s.d 2023 indikator tersebut tidak masuk dalam Indikator Perjajian Kinerja maupun dalam Renstra DPRKPCK tahun 2021-2026 sehingga target dan capaian tidak dapat direalisasikan. Dengan adanya perubahan Renstra DPRKPCK 2021-2026 indikator Peringkat/Juara dalam Penyediaan Perumahan dari Direksi Teknis Pengawas Lapangan dan Percepatan Aset PSU dijadikan Indikator Kinerja pada tahun 2024, sehingga Renstra Perubahan DPRKPCK

2021-2026 dengan Perjajian Kinerja 2024 menjadi selaras. Akan tetapi indikator kinerja tersebut tidak terealisasi dikarenakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember terkendala dengan informasi yang terlambat dari Kementrian PUPR, sehingga tidak dapat memaksimalkan kegiatan penghargaan Penyediaan Perumahan dari Direksi Teknis Pengawas Lapangan dan Percepatan Aset PSU.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	93%		
		Persentase rumah tangga berakses air Minum	97,3%		
		Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	84,19%		
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	92%		
		Prosentase Penatagunaan tanah	78%		
	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	211,65 ha		
		Persentase rumah layak huni	96%		
		Peringkat/Juara dalam Penyediaan Perumahan dari Direksi Teknis Pengawas Lapangan dan Percepatan Aset PSU	0 Penghargaan		

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Jember

Realisasi kinerja atas semua indicator sasaran yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota

se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

### C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

**Tabel 3.6**  
**Program Pendukung Sasaran**

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp8.880.323.656	Rp7.136.676.661	80,37%
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.880.323.656	Rp7.136.676.661	80,37%
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Rp452.112.796	0	0%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp725.000.000	Rp681.564.391	94%
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp4.182.049.697	Rp2.984.877.601	71%
	Sub Kegiatan : Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp3.521.161.163	Rp3.470.234.669	99%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp8.566.928.170	Rp8.015.051.468	93,58%
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan	Rp8.566.928.170	Rp8.015.051.468	93,58%

	sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota			
	Sub Kegiatan : Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rp40.000.000	0	0%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rp371.230.000	Rp200.453.716	54%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp8.155.698.170	Rp7.814.597.752	96%
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Rp12.150.302.000</b>	<b>Rp1.063.080.989</b>	<b>8,75%</b>
	Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp12.150.302.000	Rp1.063.080.989	8,75%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.446.700.000	Rp	0%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp1.703.602.000	Rp1.063.080.989	62%
<b>Total</b>		<b>Rp29.597.553.826</b>	<b>Rp16.214.809.118</b>	<b>54,78%</b>

Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Rp961.620.770	Rp886.855.596	92,26%
	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp150.153.950	Rp144.365.267	96%
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp150.153.950	Rp144.365.267	96%
	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp90.359.710	Rp71.857.056	80%
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp90.359.710	Rp71.857.056	80%
	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp721.107.110	Rp670.633.273	93%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Rp721.107.110	Rp670.633.273	93%
	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Rp86.929.230	Rp80.625.273	93%
	Kegiatan : Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp86.929.230	Rp80.625.273	93%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp86.929.230	Rp80.625.273	93%
<b>Total</b>		<b>Rp1.048.550.000</b>	<b>Rp967.480.869</b>	<b>92,27%</b>
Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Rp5.470.407.000	Rp5.167.320.153	94,46%
	Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp255.6607.095	Rp118.467.049	46%

	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Rp255.667.095	Rp118.467.049	46%
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp5.214.739.905	Rp5.048.853.104	96,82%
	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp4.550.000.000	Rp4.472.689.502	98%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp664.739.905	Rp.576.163.602	87%
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Rp500.000.000	Rp56.480.000	11%
	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp500.000.000	Rp56.480.000	11%
	Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp500.000.000	Rp56.480.000	11%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Rp103.847.775.816	Rp92.437.192.592	89%
	Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp103.847.775.816	Rp92.437.192.592	89%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp103.847.775.816	Rp92.437.192.592	89%
<b>Total</b>		<b>Rp109.818.182.816</b>	<b>Rp97.660.992.745</b>	<b>88,93%</b>

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak,**

kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang Tertata adalah sebagai berikut :

**1. Program :**

**Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

a. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	452.112.796	430.647.948
Output	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Masyarakat	120	120

Pencapaian Indikator jumlah masyarakat yang dibina dalam program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Program berhasil memenuhi target jumlah masyarakat yang dibina 100%. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan capaian realisasi tersebut berhasil untuk dicapai antara lain adalah Dana yang dikeluarkan lebih rendah dari target, namun program tetap berjalan sesuai rencana. Ini bisa disebabkan oleh pengelolaan anggaran yang lebih hemat, seperti pengurangan biaya operasional atau optimalisasi sumber daya, selain itu tidak adanya kendala signifikan dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut. Karena target indikator jumlah masyarakat yang dibina tercapai 100%, dapat disimpulkan bahwa program berjalan lancar tanpa hambatan besar seperti keterlambatan kegiatan atau kendala teknis yang memerlukan tambahan anggaran. Secara keseluruhan, realisasi program ini cukup baik karena meskipun dana yang digunakan lebih sedikit dari yang direncanakan, target jumlah masyarakat yang dibina tetap tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa program berjalan dengan efisien dan efektif tanpa pemborosan anggaran.

- b. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	725.000.000	681.564.391
Output	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	Liter/detik	20	20

Capaian realisasi ini menunjukkan bahwa meskipun dana yang digunakan lebih kecil dari anggaran yang direncanakan, target peningkatan kapasitas tetap tercapai sepenuhnya. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan capaian ini adalah Penggunaan dana yang lebih rendah dari target bisa disebabkan oleh optimalisasi biaya dalam proyek, seperti negosiasi harga bahan baku, efisiensi dalam tenaga kerja, atau pengurangan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Penyesuaian Biaya dalam Proses Implementasi. Tidak Ada Kendala dalam Pelaksanaan Program Karena kapasitas air minum meningkat sesuai target, ini menunjukkan bahwa proyek berjalan dengan lancar dan sesuai rencana, tanpa kendala besar seperti keterlambatan pekerjaan atau masalah teknis lainnya. Sub Kegiatan ini dapat dikatakan berhasil karena meskipun anggaran yang digunakan lebih sedikit dari target, hasil yang diharapkan tetap 100% tercapai hal ini dikarenakan Efisiensi dalam pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa sumber daya digunakan secara optimal tanpa mengurangi kualitas atau hasil yang diinginkan.

- c. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	4.182.049.697	2.984.877.601
Output	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/detik	250	246

Tabel ini menunjukkan hubungan antara jumlah anggaran yang digunakan (input) dan hasil yang dicapai (output) dalam proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan. Anggaran yang ditargetkan pada sub kegiatan

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan adalah sebesar Rp 4.182.049.697, dengan Realisasi sebesar Rp 2.984.877.601 sehingga capaian serapan anggaran 71,37%. Realisasi anggaran lebih rendah dari target yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan untuk target kinerja 250 liter/detik terrealisasikan 246 liter/detik capaian ini hanya 1,6% lebih rendah dari target.

Realisasi kapasitas hampir mencapai target 98,4% dari target yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa meskipun dana yang digunakan lebih rendah dari yang direncanakan, hasil proyek masih mendekati sasaran. Dengan penggunaan anggaran hanya sekitar 71,4% dari target, proyek tetap mampu mencapai 98,4% dari target output. Ini menunjukkan efisiensi yang baik. Meskipun dana yang digunakan lebih rendah, proyek tetap hampir mencapai target kapasitas. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek cukup efektif, meskipun ada sedikit deviasi dari rencana awal.

a. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	3.521.161.163	3.470.234.669
Output	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	70	70




Tabel ini memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran (input) dan hasil yang dicapai (output) dalam proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang berfokus pada penambahan jumlah sambungan rumah (SR) yang terlayani. Target Anggaran: Rp 3.521.161.163 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 3.470.234.669. Realisasi anggaran hampir sesuai dengan target yang direncanakan. Selisih yang kecil menunjukkan perencanaan anggaran yang matang dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang Terlayani yang ditargetkan sebesar 70 SR mencapai realisasi sebesar 70 SR dengan persentase capaian sebesar 100%. Target jumlah sambungan rumah tercapai sepenuhnya. Ini menunjukkan keberhasilan proyek dalam memberikan akses air minum kepada masyarakat sesuai rencana.

Dengan realisasi anggaran sebesar 98,5% dari target, proyek ini menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Selisih yang kecil dalam anggaran disebabkan oleh efisiensi dalam pengadaan material, tenaga kerja, atau optimalisasi biaya proyek lainnya. Pencapaian 100% dari target jumlah sambungan rumah menunjukkan proyek

berjalan dengan efektif dan sesuai dengan rencana awal. Tidak ada kendala besar dalam implementasi proyek, baik dari segi teknis maupun administratif.

Dengan bertambahnya 70 sambungan rumah, lebih banyak masyarakat dapat menikmati akses air minum bersih melalui jaringan perpipaan. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan, sanitasi, dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan proyek ini dapat menjadi tolok ukur untuk program serupa di masa depan.

Pekerjaan : Foto Dokumentasi Pengawasan  
Lokasi : Desa Darungan Kecamatan Tanggul

No	Pekerjaan	Dokumentasi 1	Dokumentasi 2	Dokumentasi 3
1	Pengeboran Sumur			
2	Reservoir Type KU-1000			
3	Jaringan Pipa Induk			

Dokumentasi 3

1	Start Valve			
2	Galian Jaringan Pipa Induk			
3	Sambungan Rumah			

## 2. Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

a. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	40.000.000	0
Output	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	1	0

Tabel ini menggambarkan hubungan antara jumlah anggaran yang dialokasikan (input) dan hasil yang dicapai (output) dalam proyek optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Target Anggaran: Rp 40.000.000, Realisasi Anggaran: Rp.0,- anggaran yang telah dialokasikan untuk proyek ini tidak diserap dikarenakan kondisi IPLT di Kabupaten Jember tidak dapat difungsikan. Output untuk Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Dioptimalisasi Target 1 unit dengan Realisasi 0 unit sehingga tidak ada realisasi, Optimalisasi IPLT yang direncanakan gagal dilaksanakan, sehingga tidak ada dampak positif yang dihasilkan dari kegiatan ini. Hal ini menunjukkan adanya kendala teknis dan kebijakan yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

a. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	371.230.000	200.453.716
Output	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	RT	400	400

Anggaran yang digunakan (input) dan hasil yang dicapai (output) dalam kegiatan pelayanan penyedotan lumpur tinja untuk rumah tangga adalah target anggaran Rp 371.230.000 dengan realisasi anggaran: Rp 200.453.716 dengan capaian Realisasi anggaran jauh di bawah target yang direncanakan hanya sekitar 54% dari target. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan. Output : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Target 400 RT

Dengan Realisasi 400 RT sehingga target rumah tangga yang terlayani tercapai 100%, artinya kegiatan tetap berjalan meskipun dana yang digunakan lebih rendah dari rencana awal. Penggunaan dana lebih rendah dari target tetapi output tetap tercapai.

Ini dapat mengindikasikan efisiensi atau tidak adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk Kegiatan layanan publik seperti penyedotan lumpur tinja, biasanya diharapkan lebih banyak rumah tangga yang bisa terlayani. Beberapa kemungkinan penyebab kegiatan ini tidak berjalan secara optimal adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tidak banyak yang memanfaatkan layanan ini dan masalah regulasi yang membatasi cakupan layanan.

a. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	8.155.698.170	7.814.597.752
Output	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	RT	400	400

Gambaran tentang penggunaan anggaran (input) dan pencapaian hasil (output) dalam program penyediaan toilet dan tangki septik sesuai standar bagi rumah tangga (RT). Target Anggaran: Rp 8.155.698.170 dengan Realisasi Anggaran: Rp 7.814.597.752 dengan persentase capaian sebesar 95,8%, realisasi anggaran hampir mencapai target dari yang direncanakan. Selisih ini bisa mencerminkan efisiensi penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan. Penyerapan dana yang tinggi menunjukkan bahwa proyek berjalan hampir sesuai rencana tanpa kendala besar dalam penganggaran. Output Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai Standar

Satuan mempunyai Target 400 RT dengan Realisasi 400 RT dengan persentase capaian sebesar 100%. Semua rumah tangga yang ditargetkan berhasil mendapatkan toilet dan tangki septik sesuai standar. Pencapaian target 100% menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan efektif. Hal ini berarti program kegiatan berhasil meningkatkan akses sanitasi bagi 400 rumah tangga, yang dapat berdampak

positif pada kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan. Pencapaian 100% dari target menunjukkan bahwa proyek ini efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sehingga 400 rumah tangga kini memiliki toilet dan tangki septik yang memenuhi standar, yang berkontribusi terhadap perbaikan sanitasi dan kualitas hidup masyarakat. Program ini memiliki dampak positif dalam beberapa aspek.

Dengan memiliki toilet dan tangki septik sesuai standar, risiko penyebaran penyakit akibat sanitasi buruk berkurang. Mengurangi kemungkinan kontaminasi air tanah oleh limbah domestik. Mengurangi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang masih menjadi masalah di beberapa daerah. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik. Rumah tangga yang memiliki toilet layak akan meningkatkan standar hidup dan kenyamanan mereka. Program ini bisa memberikan dampak jangka panjang dalam edukasi kebersihan dan sanitasi di masyarakat. Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pelaksanaan pembangunan jamban dan MCK adalah melakukan monitoring dengan memastikan jamban/MCK dan tangki septik yang dibangun dipelihara dengan baik agar tetap berfungsi optimal, serta melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dan perawatan fasilitas sanitasi.

## DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN MCK TAHUN 2024

**NAMA PEKERJAAN :**  
PENGAWASAN MCK PAKET 2

**LOKASI :**  
PONDOK PESANTREN NURUL JADID,  
SUMBERKETANGI, WIROLEGI



0%



50%



100%

**NAMA PEKERJAAN :**  
PENGAWASAN MCK PAKET 2

**LOKASI :**  
JL. PB SUDIRMAN NO. 16, DESA SUKOJEMBER, KEC.  
JELBUK, KAB. JEMBER



0%



50%



100%

### 3. Program : Program Penataan Bangunan Gedung

a. Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan : Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	10.446.700.000	6.746.759.656
Output	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	5	3

Tabel ini menunjukkan alokasi anggaran (input) dan pencapaian target (output) dalam pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedung strategis di tingkat kabupaten/kota. Bangunan strategis ini bisa mencakup fasilitas publik seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah, atau bangunan lain yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat. Target Anggaran Rp 10.446.700.000 dan Realisasi Anggaran Rp 6.746.759.656 Persentase Realisasi: 64,6% dari total anggaran, menunjukkan bahwa program berjalan meskipun tidak sepenuhnya menyerap anggaran yang dialokasikan. Indikator Output Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala mempunyai Target 5 bangunan dan Realisasi 3 bangunan dengan Capaian 60% dari target dengan lokasi terbangun adalah Gedung Kantor Kodim Jember, Gedung Jember Nusantara, Gedung Kantor Pemkab Jember. Bangunan yang terpelihara dengan baik dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta memperpanjang usia bangunan.








a. Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	1.703.602.000	1.063.080.989
Output	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	1000	750

Alokasi anggaran (input) dan pencapaian hasil (output) dalam penerbitan dokumen terkait bangunan gedung, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan lainnya melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) mempunyai Target Anggaran Rp 1.703.602.000 dengan realisasi Anggaran Rp 1.063.080.989 dan persentase indikator mencapai 62,4% dari yang direncanakan. Output yang dihasilkan adalah tersusunya dokumen terkait bangunan gedung dengan target 1.000 dokumen dengan realisasi 750 dokumen sehingga capaian yang tercapai 75% dari target. Dari target 1.000 dokumen, hanya 750 dokumen yang berhasil diterbitkan, yang berarti ada kekurangan sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang digunakan lebih rendah dari target, hasil yang dicapai juga tidak mencapai 100%.

Ada kendala administratif yang menyebabkan keterlambatan atau berkurangnya jumlah dokumen yang dapat diproses. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan realisasi output lebih rendah dari target antara lain yaitu kendala teknis pada sistem SIMBG, jika sistem mengalami gangguan atau keterbatasan akses, hal ini bisa memperlambat proses penerbitan dokumen, kendala lain yang dihadapi dalam proses verifikasi dokumen PBG dan SLF memerlukan pemeriksaan teknis dan administratif yang ketat jika ada kendala dalam validasi atau pengajuan dokumen yang tidak lengkap ini bisa memperlambat proses penerbitan. Serta kurangnya kesadaran atau sosialisasi kepada masyarakat atau pemilik bangunan belum sepenuhnya mengetahui atau memahami prosedur pengajuan dokumen ini, sehingga jumlah permohonan yang masuk lebih sedikit dari yang diharapkan.

TUJUAN		JENIS BANGUNAN	HASIL SURVEY	
NAMA	LOKASI		FOTO	KET.
ANDI BASO	Jl. Piere Tendean Gg. Mojopahit, Kel. Karangrejo	Rumah Produksi		(Laik Fungsi, Bangunan Tidak Melanggar)
H Muhlis	Dusun tegalan rt 01 rw 01 kel. Sumberkejayan kec. Mayang kab. Jember	Gedung Sekolah		(Laik Fungsi, Bangunan Tidak Melanggar)
PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Desa Sidomukti mayang	Tower		(Laik Fungsi, Bangunan Tidak Melanggar)
PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Desa Sidomulyo silo	Tower		(Laik Fungsi, Bangunan Tidak Melanggar)
LUKMAN HAKIM	Jl. Kaliurang Gang Swadaya No.01 Kel. Sumbersari	Rumah dan Toko		(Laik Fungsi, Bangunan Tidak Melanggar)
Nugroho Ediyono Deddy	Jl. Sriwijaya V Kavling No.5 Kelurahan Karangrejo	Rumah Kediaman		(Laik Fungsi, Bangunan Tidak Melanggar)
MUHAMMAD RIDWAN SIDIQ	Jl. Sri Tanjung RT.003 RW.006 Kel. Wirolegi	GUDANG SIDIQ		(Laik Fungsi, Bangunan Tidak Melanggar)

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan** adalah sebagai berikut :

**1. Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang**

a. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	150.153.950	144.365.267
Output	Jumlah Dokumen koordinasi Penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	200	200

Sub Kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, yang diukur berdasarkan indikator jumlah dokumen yang diterbitkan menunjukkan alokasi target anggaran Rp 150.153.950 dengan realisasi anggaran Rp 144.365.267 dengan capaian 96,15% dari target, ini menunjukkan bahwa anggaran hampir sepenuhnya digunakan sesuai perencanaan. Output yang dihasilkan dari sub kegiatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan target 200 dokumen dan realisasi 200 dokumen dengan Capaian 100% dari target penerbitan dokumen yang tercapai sepenuhnya, yang berarti program ini berhasil dilaksanakan sesuai rencana.

Dengan 100% pencapaian target, program ini berjalan sesuai rencana tanpa ada kendala berarti. Keberhasilan ini menandakan bahwa sistem koordinasi dan administrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang berjalan dengan baik. Jika semua dokumen telah disusun sesuai standar, maka ini akan mempermudah perencanaan dan pengelolaan ruang wilayah di masa depan. Dengan tersedianya dokumen yang lengkap dan tepat waktu, maka koordinasi antar instansi dalam perencanaan tata ruang akan lebih efektif. Dokumen koordinasi yang terkelola dengan baik akan mendukung kebijakan yang lebih cepat dan akurat dalam pengelolaan tata ruang. Dengan adanya dokumen koordinasi yang lengkap, setiap kebijakan atau proyek pembangunan yang berkaitan dengan tata ruang memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga mengurangi potensi konflik tata ruang. Keberhasilan pencapaian target dengan efisiensi anggaran menunjukkan pengelolaan yang transparan, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap kebijakan tata ruang.

- a. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	90.359.710	71.857.056
Output	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	6	6

Target Anggaran Rp 90.359.710 dengan realisasi anggaran Rp 71.857.056, capaian realisasi anggaran 79,5% dari yang direncanakan, Output yang dihasilkan Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang target 6 dokumen realisasi 6 dokumen dengan capaian 100% dari target. Semua dokumen yang direncanakan berhasil diterbitkan, sehingga program ini memenuhi target output secara penuh. Tidak ada defisit atau kelebihan dalam output, menunjukkan perencanaan yang presisi antara anggaran dan capaian program. Keberhasilan ini menandakan bahwa sistem koordinasi dan administrasi dalam pelaksanaan penataan ruang telah berjalan dengan baik. Jika semua dokumen telah disusun sesuai standar, maka ini akan mempermudah perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan tata ruang di masa depan. Dengan tersedianya dokumen yang lengkap dan tepat waktu, maka koordinasi antar instansi dalam perencanaan tata ruang akan lebih efektif. Mempercepat Pengambilan Keputusan. Dokumen koordinasi yang tersusun dengan baik akan mempermudah pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

- a. Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	721.107.110	670.633.273
Output	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1

Tabel ini menampilkan alokasi dana (input) dan pencapaian hasil (output) dalam penerbitan surat persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dengan target anggaran Rp 721.107.110 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp 670.633.273 dengan capaian persentase 93% dari target, yang menunjukkan bahwa program ini hampir sepenuhnya berjalan sesuai perencanaan. Output Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota mempunyai Target 1 dokumen dengan Realisasi 1 dokumen sehingga mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan tercapai sepenuhnya, yang berarti program ini berhasil menghasilkan dokumen yang direncanakan. Dokumen ini sangat penting karena menjadi landasan hukum dalam pengelolaan tata ruang di tingkat Kabupaten/Kota. Tidak ada kendala dalam pencapaian output, menandakan bahwa proses penyusunan, koordinasi, dan persetujuan dokumen berjalan dengan baik. Dengan 100% pencapaian target output, program ini dapat dikategorikan sangat efektif. Dokumen persetujuan substansi RTRW merupakan bagian penting dari perencanaan tata ruang karena menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang, izin pembangunan, dan perencanaan infrastruktur. Keberhasilan ini menandakan bahwa mekanisme penyusunan, verifikasi, dan persetujuan dokumen berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur.

Dampak Positif dari Keberhasilan Program yang dilaksanakan adalah Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Tata Ruang. Dengan adanya surat persetujuan substansi RTRW, Kabupaten/Kota memiliki dasar hukum yang jelas dalam perencanaan dan pengelolaan ruang wilayah. Dokumen ini menjadi panduan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan tata ruang, menghindari tumpang tindih kebijakan, dan mempercepat perizinan pembangunan.



Survey lokasi ITR dan KKPT



Rapat Forum Penataan Ruang



Rapat Lintas Sektor RTRW

## 2. Program : Penatagunaan Tanah

a. Kegiatan : Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	86.929.230	80.625.273
Output	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1

Tabel ini menggambarkan alokasi anggaran (input) dan pencapaian hasil (output) dalam koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam satu Kabupaten/Kota, yang diukur berdasarkan jumlah laporan yang dihasilkan. Target Anggaran yang ditetapkan Rp 86.929.230 dengan capaian Realisasi Anggaran Rp 80.625.273. Realisasi anggaran mencapai 92,7% dari target, menunjukkan bahwa program ini hampir sepenuhnya terlaksana sesuai dengan rencana anggaran. Output yang dihasilkan sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dengan Target 1 dokumen dan Realisasi 1 dokumen Capaian 100% dari target. Program ini berhasil mencapai target output yang telah ditetapkan. Laporan ini sangat penting karena berisi hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah di Kabupaten/Kota, yang menjadi dasar kebijakan pengelolaan tanah. Tidak ada kendala dalam penyelesaian laporan, menandakan bahwa proses koordinasi antar instansi terkait berjalan dengan baik. Laporan ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan tanah, karena membantu menghindari konflik penggunaan lahan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan ini menandakan bahwa mekanisme koordinasi dan sinkronisasi telah berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan. Dampak Positif dari Keberhasilan Program.

Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Penggunaan Tanah. Dengan adanya laporan koordinasi dan sinkronisasi, penggunaan tanah menjadi lebih terarah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mendukung Perencanaan Pembangunan yang Terintegrasi Laporan ini menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait tata guna lahan, termasuk perizinan pembangunan dan investasi daerah.

Mencegah Konflik Pertanahan Dengan adanya sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah, potensi tumpang tindih kepemilikan atau penggunaan lahan dapat diminimalisir, sehingga mengurangi potensi sengketa.

Program ini berhasil mencapai 100% target output , Keberhasilan ini menunjukkan bahwa koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam Kabupaten/Kota berjalan efektif dan efisien.



*Penyerahan setifikat program land consolidation masyarakat nelayan desa puger kulon dan puger wetan*



*Uji coba alat GPS*

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak** adalah sebagai berikut :

**1. Program : Kawasan Permukiman**

a. Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	255.667.095	118.467.049
Output	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	20	20

Tabel ini menyajikan alokasi anggaran (input) dan hasil pencapaian (output) dalam penerbitan dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara elektronik dengan target anggaran Rp 255.667.095 Realisasi Anggaran Rp 118.467.049 sehingga capaian Realisasi anggaran hanya 46,3% dari yang direncanakan, Penghematan anggaran ini cukup signifikan, yang bisa disebabkan oleh Efisiensi dalam proses penyusunan dokumen dan koordinasi dengan pengembang. Indikator Output Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah mempunyai Target 20 dokumen dan Realisasi: 20 dokumen dengan Capaian 100% dari target, artinya semua dokumen kesepakatan dengan pengembang berhasil diterbitkan sesuai rencana.

Dokumen ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan permukiman sesuai dengan regulasi yang berlaku dan berjalan secara terintegrasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa koordinasi dengan pengembang dan proses perizinan berjalan lancar dan mekanisme penerbitan izin secara elektronik telah berjalan dengan baik dan mungkin lebih cepat dibandingkan metode manual.

Dampak Positif dari Keberhasilan Program adalah Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi dalam Perizinan Pembangunan. Dengan adanya dokumen kesepakatan yang terintegrasi secara elektronik, proses perizinan menjadi lebih terbuka, cepat, dan efisien. Dokumen ini memastikan bahwa pengembang mematuhi aturan dalam pembangunan kawasan permukiman, termasuk standar infrastruktur dan tata ruang.

- a. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	4.550.000.000	4.472.689.502
Output	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Dokumen	150	150

Tabel ini menunjukkan alokasi anggaran (input) dan hasil pencapaian (output) dalam program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat melalui perbaikan rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan dengan Target Anggaran: Rp 4.550.000.000 dan Realisasi Anggaran: Rp 4.472.689.502 Realisasi anggaran mencapai 98,3% dari target, menunjukkan bahwa program ini berjalan sesuai dengan rencana anggaran dengan sedikit penghematan.

Tidak adanya penyimpangan signifikan dalam penggunaan dana menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah direncanakan dengan baik dan digunakan secara optimal. indikator Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dengan Target: 150 unit rumah dan Realisasi: 150 unit rumah dengan Capaian 100% dari target output yang artinya semua rumah yang direncanakan untuk diperbaiki telah selesai diperbaiki. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mekanisme perbaikan rumah berjalan efektif, baik dari segi pengadaan bahan, pelaksanaan konstruksi, maupun koordinasi dengan penerima manfaat.

Dampak langsung dari capaian ini adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat, dengan kondisi rumah yang lebih layak dan sehat untuk ditinggali. Keberhasilan perbaikan 150 rumah sesuai target menandakan bahwa Seleksi rumah penerima manfaat telah dilakukan dengan baik. Proses konstruksi berjalan sesuai jadwal dan tanpa kendala besar. Koordinasi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat penerima manfaat berjalan optimal. Program ini berkontribusi langsung terhadap pengurangan jumlah rumah tidak layak huni, yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dalam sektor perumahan. Dampak Positif dari Keberhasilan kegiatan perbaikan rumah layak huni adalah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Perbaikan rumah meningkatkan kualitas hidup penghuni, termasuk aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Rumah yang tidak layak sering kali memiliki masalah struktural, ventilasi buruk, dan sanitasi yang kurang memadai. Dengan perbaikan ini, masyarakat menjadi lebih terlindungi dari risiko penyakit dan bahaya bangunan roboh. Selain itu kegiatan ini juga mendukung program Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan karena sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait permukiman layak, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Efisiensi Anggaran Bisa Dialihkan ke Program Lain

- a. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

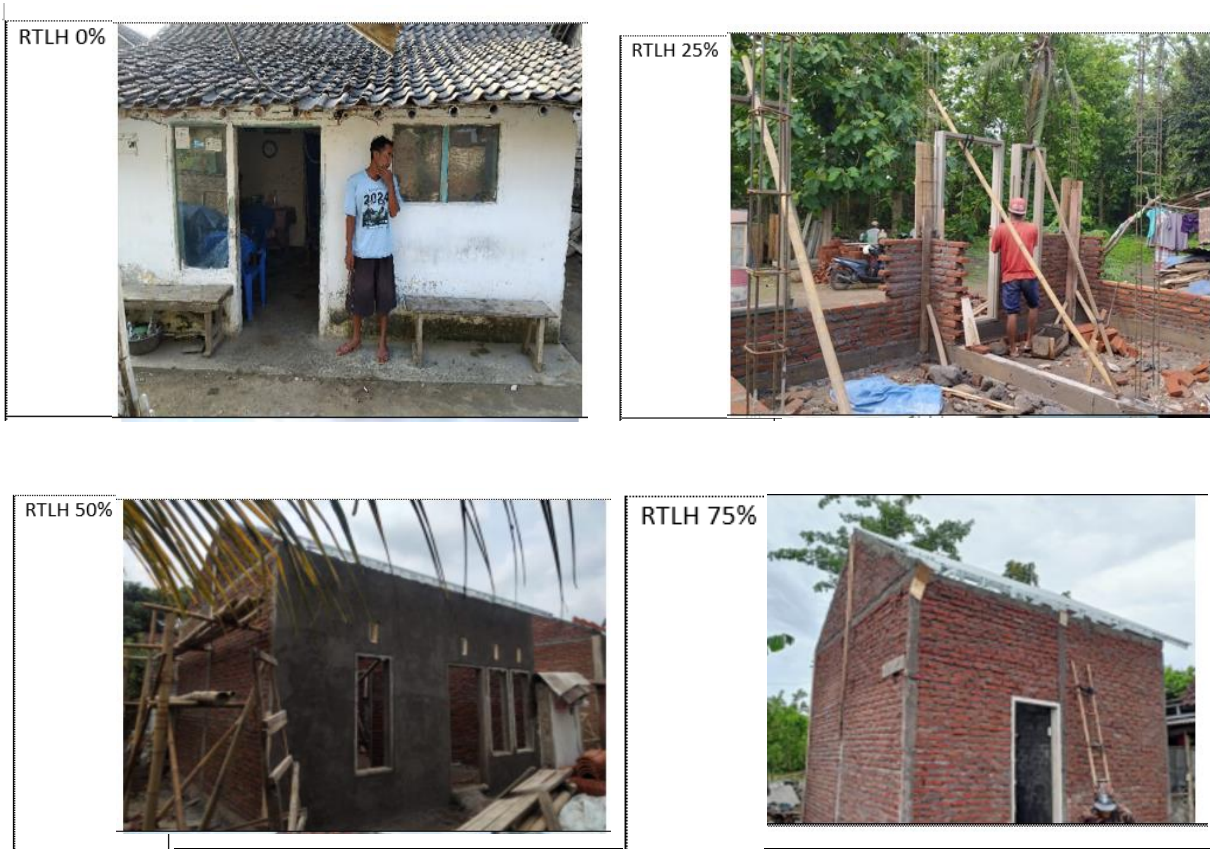
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	664.739.905	576.163.602
Output	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen	10	10

Tabel ini menyajikan alokasi anggaran (input) dan hasil pencapaian (output) dalam program koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan kualitas permukiman melalui laporan koordinasi dan sinkronisasi. Dalam kegiatan ini menetapkan target anggaran Rp 664.739.905 dengan Realisasi Anggaran Rp 576.163.602, realisasi anggaran mencapai 86,7% dari target, menunjukkan bahwa program ini dapat dijalankan dengan pengeluaran yang lebih rendah dari estimasi awal. Indikator jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan target sebesar 10 dokumen dan Realisasi 10 dokumen dengan Capaian: 100% dari target, artinya semua laporan koordinasi dan sinkronisasi yang direncanakan telah disusun dan diselesaikan.

Laporan ini sangat penting untuk mengidentifikasi strategi peremajaan permukiman kumuh dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan kebijakan tata ruang dan lingkungan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi antarinstansi, pengumpulan data, serta penyusunan laporan telah berjalan secara efektif dan efisien. Proses koordinasi dan sinkronisasi berjalan tanpa kendala besar yang menghambat pencapaian target. Dampak positif dari keberhasilan program adalah meningkatkan perencanaan penataan permukiman kumuh. Meskipun program ini berhasil, tetap perlu dilakukan evaluasi terhadap isi laporan dan efektivitas koordinasi, untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dibuat benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan peremajaan permukiman kumuh.

#### Dokumentasi Pembangunan RTLH



## 2. Program : Pengembangan Perumahan

a. Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	500.000.000	56.480.000
Output	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	10	0

Tabel ini menggambarkan alokasi anggaran (input) dan hasil pencapaian (output) dalam program pembangunan rumah bagi korban bencana di tingkat kabupaten/kota. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana, namun berdasarkan realisasi, program ini tidak mencapai target yang diharapkan. Target anggaran yang ditentukan Rp 500.000.000 dan realisasi anggaran Rp 56.480.000, sedangkan Output dari indikator Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang Terbangun dengan Target 10 rumah dan Realisasi: 0 rumah dengan Capaian 0% dari target, rendahnya penyerapan anggaran dan tidak terlaksananya kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidaksiapan regulasi terkait pembangunan rumah bagi korban bencana dan masalah teknis dalam implementasi program, seperti kurangnya koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Tindak lanjut untuk terlaksananya kegiatan Pembangunan rumah korban bencana adalah dengan Meningkatkan Koordinasi dan Perencanaan

### 3. Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

#### a. Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	103.847.775.816	92.437.192.592
Output	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	31	31

Tabel ini menunjukkan alokasi anggaran (input) dan hasil pencapaian (output) dalam program penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di lokasi perumahan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan agar layak huni dengan menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, penerangan, serta fasilitas umum lainnya. Target Anggaran Rp 103.847.775.816 dan Realisasi Anggaran: Rp 92.437.192.592 persentase capaian serapan anggran 88,99% dari anggaran yang dialokasikan, yang menunjukkan bahwa program berjalan dengan baik dalam hal pengelolaan dana.

Indikator Output Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai target: 31 lokasi dengan realisasi 31 lokasi sehingga kegiatan berhasil mencapai target 100% dalam menyediakan PSU di 31 lokasi perumahan. Keberhasilan ini menunjukkan perencanaan dan implementasi yang baik, serta koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, pengembang perumahan, dan masyarakat. Penyediaan PSU yang tepat waktu dan sesuai target akan meningkatkan kualitas hunian, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi masyarakat di perumahan tersebut. Dampak Positif dari kegiatan ini antara lain :

#### a. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Dengan tersedianya prasarana (jalan, drainase, listrik), sarana (ruang terbuka hijau, tempat ibadah, fasilitas olahraga), dan utilitas umum (air bersih, sanitasi, penerangan jalan), lingkungan perumahan menjadi lebih nyaman dan layak huni.

#### b. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Penyediaan PSU yang baik akan meningkatkan daya tarik kawasan perumahan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta mengurangi potensi kawasan kumuh di masa depan.

c. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Program ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus di kota besar, tetapi juga mencakup berbagai wilayah, sesuai dengan kebijakan pemerataan pembangunan.



*Paket 17 (Kel. Jember Kidul)*



*Paket 16 (Kel. Kaliwates)*

#### **D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember berjumlah 307 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp204.044.633.914,00 melaksanakan 9 program 18 kegiatan dan 36 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
<b>1. Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata</b>	85,36%	54,78%	Efisien
<b>2. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</b>	100%	92,27%	Efisien
<b>3. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak</b>	95,48%	88,93%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

## **E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Analisis capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
<b>Sasaran 1</b> <b>Meningkatkan</b> <b>Kualitas Air Minum,</b> <b>Sanitasi layak,</b> <b>kuantitas Sarana</b> <b>dan prasarana</b> <b>Bangunan gedung</b> <b>yang</b> <b>Tertata</b>						
Indikator 1.1 Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis Kontruksi	<b>95,8%</b>	√				
Indikator 1.2 Persentase rumah tangga berakses air Minum	<b>115%</b>	√				
Indikator 1.3 Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	<b>97%</b>	√				
Rata rata capaian	<b>102%</b>					
<b>Sasaran 2</b> <b>Terwujudnya</b> <b>penyelenggaraan</b> <b>penataan ruang</b> <b>yang</b> <b>Berkelanjutan</b>						
Indikator 2.1 Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	<b>101 %</b>	√				
Indikator 1.2 Prosentase Penata gunaan tanah	<b>121%</b>	√				
Rata rata capaian	<b>111%</b>	√				
<b>Sasaran 3</b> <b>Meningkatkan</b> <b>Kualitas dan</b> <b>kuantitas</b> <b>perumahan dan</b> <b>permukiman yang</b> <b>layak</b>						

Indikator 3.1 Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	<b>110%</b>	√				
Indikator 3.2 Persentase rumah layak Huni	<b>104%</b>	√				
Indikator 3.3 Peringkat/Juara dalam Penyediaan Perumahan dari Direksi Teknis Pengawas Lapangan dan Percepatan Aset PSU	<b>0%</b>					√
Rata rata capaian	<b>71,33%</b>		√			

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata mencapai **predikat sangat tinggi** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 102 %,

1. Beberapa hal yang menjadi pemasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah
  - a. Masyarakat yang kurang teredukasi tentang penggunaan aplikasi SIMBG dalam pengajuan PBG dan SLF.
  - b. Kurangnya Monitoring ataupun pengawasan terhadap kesesuaian izin pendirian bangunan.
  - c. Pelayanan air minum non perpipaan sebagian besar di perdesaan belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri
  - d. Berkurangnya debit air dikarenakan banyaknya pembangunan perumahan.
  - e. Terbatasnya sumber air baku dibeberapa daerah.
  - f. Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.
  - g. Masih terdapat dan kurang teredukasinya masyarakat yang mempunyai hebit BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

- h. Belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah
2. Solusi terhadap kendala kedepan adalah
    - a. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat melalui Kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
    - b. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Pelayanan Air Minum dan peran serta seluruh Stake holder dalam upaya mencapai sasaran pembanguna air minum di pekotaan dan di perdesaan.
    - c. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber air baku.
    - d. Meningkatkan kualitas IPLT sebagai pengelolaan air limbah.
    - e. Menciptakan iklim yang kondusif untuk berperan serta dalam meningkatkan
    - f. pelayanan air limbah yang layak untuk masyarakat.
    - g. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

#### Sasaran Strategis 2 : **Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan mencapai **predikat sangat tinggi** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 111 %,

Beberapa hal yang menjadi pemasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Jember sebagai dokumen integrasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Kurangnya pemanfaatan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilyah.

Solusi perbaikan terhadap pemasalah ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya akan :

1. Percepatan Penetapan Perda RTRW Kabupaten Jember.
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui konsultasi publik.

### Sasaran Strategis 3 : **Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak mencapai **predikat sedang** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 71,33 %,

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni.
2. Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman sehingga menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
3. Terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di desa tertinggal di Kabupaten Jember.

Solusi perbaikan terhadap pemasalah ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya akan :

1. Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana dan prasarana di kawasan permukiman sehingga kualitas lingkungan permukiman meningkat dan luasan kawasan kumuh berkurang.
3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman di desa tertinggal di Kabupaten Jember.

## **F. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp204.044.633.914,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp150.703.146.229,00 terealisasi sebesar Rp141.563.786.428,00 (93,94%)
2. Belanja Modal sebesar Rp53.341.487.685,00 terealisasi sebesar Rp40.234.889.215,00 (75,43%)

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,**  
**dan Cipta Karya Kab. Jember Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	<b>Program</b> penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp63.580.347.272		
1.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp292.038.571		
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp292.038.571	Rp233.355.543	80%
1.2	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp10.391.576.403		
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp9.569.486.283	Rp8.659.135.357	90%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp604.145.150	Rp476.234.657	79%
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp217.944.970	Rp171.218.649	79%
1.3	<b>Kegiatan</b> Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp107.444.115		
	<b>Sub Kegiatan</b> Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp107.444.115	Rp104.933.373	98%
1.4	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp1.700.845.851		
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp31.489.923	Rp31.414.472	100%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp833.330.519	Rp745.098.256	89%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp579.495.647	Rp578.337.623	100%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp55.449.950	Rp54.976.537	99%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp201.079.812	Rp200.349.299	100%
1.5	<b>Kegiatan</b> Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp49.039.800		

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp49.039.800	Rp49.039.800	0%
1.6	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp48.497.474.304		
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp40.329.544.684	Rp38.531.753.144	96%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp173.750.000	Rp171.538.947	99%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp7.994.179.620	Rp7.454.596.269	93%
1.7	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.541.928.228		
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp94.952.128	Rp90.398.503	95%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp2.026.959.535	Rp1.983.523.168	98%
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp319.841.755	Rp319.414.790	100%
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp100.174.810	Rp95.881.909	96%
2.	<b>Program</b> Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp8.880.323.656		
2.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.880.323.656		
	<b>Sub Kegiatan</b> Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Rp452.112.796	-	0%

	Penyediaan Air Minum SPAM			
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Rp725.000.000	Rp681.564.391	94%
	<b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Rp4.182.049.697	Rp2.984.877.601	71%
	<b>Sub Kegiatan</b> Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Rp3.521.161.163	Rp3.470.234.669	99%
3.	<b>Program</b> Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp8.566.928.170		
3.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.566.928.170		
	<b>Sub Kegiatan</b> Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPLT	Rp40.000.000		0%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rp371.230.000	Rp200.453.716	54%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Setempat	Rp8.155.698.170	Rp7.814.597.752	96%
4.	<b>Program</b> Penataan Bangunan Gedung	Rp12.150.302.000		
4.1	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp12.150.302.000		
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.446.700.000		
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan	Rp1.703.602.000	Rp1.063.080.989	62%

	Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
5.	<b>Program</b> Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp961.620.770		
5.1	<b>Kegiatan</b> Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang RRTR Kabupaten/Kota	Rp721.107.110		
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Rp721.107.110	Rp670.633.273	93%
5.2	<b>Kegiatan</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp150.153.950		
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp150.153.950	Rp144.365.267	96%
5.3	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp90.359.710		
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp90.359.710	Rp71.857.056	80%
6.	<b>Program</b> Pengembangan Perumahan	Rp500.000.000		
6.1	<b>Kegiatan</b> Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp500.000.000		
	<b>Sub Kegiatan</b> pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp500.000.000	Rp56.480.000	11%
7.	<b>Program</b> Kawasan Permukiman	Rp5.470.407.00		
7.1	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp255.667.095		
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Rp255.667.095	Rp118.467.049	46%
7.2	<b>Kegiatan</b> Peningkatan Kualitas Kawasan	Rp5.214.739.905		

	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
	<b>Sub Kegiatan</b> Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp4.550.000.000	Rp4.472.689.502	98%
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp664.739.905	Rp576.163.602	87%
8.	<b>Program</b> Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Psu	Rp103.847.775.816	Rp92.437.192.592	89%
8.1	<b>Kegiatan</b> Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp103.847.775.816	Rp92.437.192.592	89%
	<b>Sub Kegiatan</b> penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp103.847.775.816	Rp92.437.192.592	89%
9.	<b>Program</b> Penatagunaan Tanah	Rp86.929.230	Rp80.625.273	93%
9.1	<b>Kegiatan</b> Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp86.929.230	Rp80.625.273	93%
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp86.929.230	Rp80.625.273	93%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp204.044.633.914</b>	<b>Rp181.868.317.882</b>	<b>89,13%</b>

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember Tahun 2024

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 8 (delapan) Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 7 (tujuh) indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak 1 (satu) indikator tidak mencapai target dengan kategori sedang.

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

4. Hambatan dan Permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata yaitu :
  - i. Masyarakat yang kurang teredukasi tentang penggunaan aplikasi SIMBG dalam pengajuan PBG dan SLF.
  - j. Kurangnya Monitoring ataupun pengawasan terhadap kesesuaian izin pendirian bangunan.
  - k. Pelayanan air minum non perpipaan sebagian besar di perdesaan belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.
  - l. Berkurangnya debit air dikarenakan banyaknya pembangunan perumahan.
  - m. Terbatasnya sumber air baku di beberapa daerah.
  - n. Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.
  - o. Masih terdapat dan kurang teredukasinya masyarakat yang mempunyai hebit BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

- p. Belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.
5. Hambatan dan Permasalahan pada Sasaran Strategis Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, yaitu :
- c. Belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Jember sebagai dokumen integrasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
  - d. Kurangnya pemanfaatan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
6. Hambatan dan Permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak, yaitu :
- d. Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni.
  - e. Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman sehingga menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
  - f. Terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di desa tertinggal di Kabupaten Jember

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2024 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

4. Solusi Perbaikan untuk permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata, yaitu :
- g. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat melalui Kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
  - h. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Pelayanan Air Minum dan peran serta seluruh Stake holder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dipekotaan dan diperdesaan.
  - i. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber air baku.
  - j. Meningkatkan kualitas IPLT sebagai pengelolaan air limbah.
  - k. Menciptakan iklim yang kondusif untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air limbah yang layak untuk masyarakat.
  - l. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

5. Solusi Perbaikan untuk permasalahan pada Sasaran Strategis Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, yaitu :
  - c. Percepatan Penetapan Perda RTRW Kabupaten Jember.
  - d. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui konsultasi publik.
6. Solusi Perbaikan untuk permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak, yaitu :
  - c. Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
  - d. Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana dan prasarana di kawasan permukiman sehingga kualitas lingkungan permukiman meningkat dan luasan kawasan kumuh berkurang.
  - e. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman di desa tertinggal di Kabupaten Jember

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.



DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER

224.810.931.772

-3.164.887.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
<b>TOTAL ANGGARAN</b>								0	0	221.646.044.772	175.694.285.417	176.756.409.417	177.686.628.417	751.783.368.023											
<b>1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk Pemenuhan Pelayanan Publik</b>																									
<b>1. Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar</b>																									
<b>1. Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi Layak, Kuantitas Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung yang Tertata</b>																									
<b>1.1 Persentase Bangunan Gedung yang sesuai dengan Standar Teknis</b>																									
RPJMD 2021-2026	1 03 08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan berIMB per satuan bangunan	1.000 Unit	Unit					1.000 Unit	15.752.112.350	1.000 Unit	15.000.000.000	1.000 Unit	15.000.000.000	1.000 Unit	15.000.000.000	7.000 Unit	60.752.112.350	DPRKCK				
	1 03 08 2.01		Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah gedung negara terbangun dan yang direhabilitasi	31 gedung	gedung	0	gedung	0	26 gedung	15.752.112.350	10 gedung	19.500.000.000	10 gedung	19.500.000.000	10 gedung	19.500.000.000	56 gedung	86.941.211.790						
	1 03 08 2.01 01		Penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), Sertifikat laik fungsi (SLF), Peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), Pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	18.133 Dok	dok		dok		1.000 dok	784.346.110	1.000 dok	15.000.000.000	1.000 dok	15.000.000.000	1.000 dok	15.000.000.000	1.000 dok	45.784.346.110						
	1 03 08 2.01 02		Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	31	dok		dok		26 dok	666.000.000	10 dok	2.000.000.000	10 dok	2.000.000.000	10 dok	2.000.000.000	87 dok	21.225.973.600						
	1 03 08 2.01 05		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		Dok		Dok		1 dok	370.874.160	1 dok	500.000.000	1 dok	500.000.000	1 dok	500.000.000	4 dok							
	1 03 08 2.01 13		Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	31	Unit		Unit		26 Unit	13.930.892.080	10 Unit	2.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	87 Unit	19.930.892.080						
RPJMD 2021-2026	1 03 11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI				0		0		0			20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000	DPRKCK				
			Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi		0 Pelatihan	Pelatihan		Pelatihan		10 Pelatihan	10.000.000	10 Pelatihan	10.000.000	10 Pelatihan	10.000.000	10 Pelatihan	10.000.000	30 Pelatihan	30.000.000	DPRKCK					
			Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah		0 Sistem	Sistem		Sistem		10 Sistem	10.000.000	10 Sistem	10.000.000	10 Sistem	10.000.000	10 Sistem	10.000.000	30 Sistem	30.000.000	DPRKCK					
	1 03 11 2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih		0 orang	0	orang	0	0 orang	0	0 orang	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	3 orang	60.000.000					
	1 03 11 2.01 06		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan		0 orang	0	orang	0	0 orang	0	0 orang	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	3 orang	60.000.000					
	1 03 11 2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara kabupaten		0 Dok	0	Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	300.000.000					
	1 03 11 2.02 02		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		0 Dok	0	Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	300.000.000					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
<b>1.2 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum</b>																									
RPJMD 2021-2026	1 03 03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Penduduk yang memiliki akses air minum		71,36 %	100 %		100 %		100 %	10.111.209.797	100 %	20.000.000.000	100 %	20.000.000.000	100 %	20.000.000.000	100 %	70.111.209.797	DPRKCK			
	1 03 03 2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang mendapatkan layanan air minum		280.599 SR	SR	0	SR	0	200 SR	10.111.209.797	200 SR	26.615.309.912	200 SR	26.615.309.912	200 SR	26.615.309.912	281.399 SR	89.957.139.533				
	1 03 03 2.01 03		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun		0 Liter/De	0	0 Liter/De	0	1.000 Liter/De	249.785.700	1.000 Liter/De	1.150.000.000	1.000 Liter/De	1.150.000.000	1.000 Liter/De	1.150.000.000	4.000 Liter/De	3.699.785.700					
	1 03 03 2.01 04		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perdesaan		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis			SR		lokasi	90 SR	1.130.041.201	600 SR	13.021.491.260	600 SR	13.021.491.260	600 SR	13.021.491.260	1.890 SR	40.194.514.981					
	1 03 03 2.01 06		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang air bersih pada kawasan Perdesaan								1.000 SR	5.000.000.000	1.000 SR	5.000.000.000	1.000 SR	5.000.000.000	3.000 SR	15.000.000.000					
	1 03 03 2.01 07		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		0 SR		0 SR		70 SR	809.918.960	100 SR	550.000.000	100 SR	550.000.000	100 SR	550.000.000	370 lokasi	2.459.918.960					
	1 03 03 2.01 11		Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa		Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi		1 kelompok		kelompok		15 kelompok	191.828.400	15 kelompok	1.500.000.000	15 kelompok	1.500.000.000	15 kelompok	1.500.000.000	60 kelompok	4.691.828.400					
	1 03 03 2.01 19		Perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah jaringan Sistem Penyediaan Air Minum yang diperluas di kawasan Perdesaan			lokasi		lokasi	15 lokasi	7.729.635.536	15 lokasi	5.393.818.652	15 lokasi	5.393.818.652	15 lokasi	5.393.818.652	60 lokasi	23.911.091.492					
<b>1.3 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Aman</b>																									
RPJMD 2021-2026	1 03 05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase rumah tinggal bersanitasi		76,25 %					100 %	18.770.771.656	100 %	30.000.000.000	100 %	30.000.000.000	100 %	30.000.000.000	100 %	108.770.771.656	DPRKCK			
	1 03 05 2.01		Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota		Jumlah SR dengan sanitasi layak		300.359 SR	SR	0	SR	0	200 SR	18.770.771.656	200 SR	30.000.000.000	200 SR	30.000.000.000	200 SR	30.000.000.000	301.159 SR	108.770.771.656				
	1 03 05 2.01 06		Pembangunan atau penyediaan sub sistem pengolahan setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik							15.999.820.000		24.000.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000							
					1. Jumlah MCK yang terbangun		86 Lokasi	1 lokasi		1 lokasi	30 lokasi		45 lokasi	9.000.000.000	45 lokasi	9.000.000.000	45 lokasi	9.000.000.000	252 lokasi	27.000.000.000					
					2. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki		2.064 Unit	Unit		Unit	800 Unit		1.500 Unit	15.000.000.000	1.500 Unit	15.000.000.000	1.500 Unit	15.000.000.000	7.364 Unit	45.000.000.000					
	1 03 05 2.01 10		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dielihara			0 Lokasi		0 Lokasi			1 Lokasi	5.000.000.000	1 Lokasi	5.000.000.000	1 Lokasi	5.000.000.000	1 Lokasi	15.000.000.000					
	1 03 05 2.01 15		Pembangunan /penyediaan sarana dan prasarana IPLT		Kapasitas IPLT Terbangun			M3/Hari		M3/Hari	28 M3/Hari	2.770.951.656	28 M3/Hari	1.000.000.000	28 M3/Hari	1.000.000.000	28 M3/Hari	1.000.000.000	112 M3/Hari	5.770.951.656					
	1 03 06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase peningkatan drainase dalam kondisi baik/ pembersihan aliran air tidak tersumbat		32 %					7 %	47.696.948								47.696.948				
	1 03 06 2 01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di lingkungan permukiman							47.696.948		500.000.000		500.000.000		500.000.000		1.547.696.948					
	1 03 06 2 01 12		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun						100 Meter	47.696.948	1.000 Meter	500.000.000	1.000 Meter	500.000.000	1.000 Meter	500.000.000		1.547.696.948					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi											
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp									
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22			
<b>2.Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkelanjutan</b>																																		
<b>2.1 Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang</b>																																		
RPJMD 2021-2026	1 03 12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Terselenggaranya penyusunan dokumen rencana tata ruang dan			0		0		1.173.320.256		6.340.000.000		6.824.000.000		7.356.000.000		21.693.320.256														
					Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun		1 Dok	Dok		Dok		5 Dok		5 Dok		1.500.000.000		5 Dok		1.500.000.000		6 Dok		1.500.000.000		21 Dok		4.500.000.000		DPRKCK				
					Jumlah kecamatan yang telah memiliki rencana detail tata ruang		3 Kec	Kec		Kec		5 Kec		5 Kec		4.840.000.000		5 Kec		5.324.000.000		6 Kec		5.856.000.000		29 Kec		16.020.000.000		DPRKCK				
	1 03 12 2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Terselenggaranya penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota			0		0		740.390.620																						
	1 03 12 2.01 01		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				Dok		Dok		1 Dok		275.000.000		2 Dok		1.000.000.000		2 Dok		1.000.000.000		0 Dok		0		5 Dok					
	1 03 12 2.01 02		Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				Dok		Dok		1 Dok		465.122.000		2 Dok		1.000.000.000		2 Dok		1.000.000.000		0 Dok		0		5 Dok					
	1 03 12 2.01 04		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				Dok		Dok		1 Dok		268.620		1 Dok		340.000.000		1 Dok		824.000.000		1 Dok		356.000.000		4 Dok					
	1 03 12 2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen tata Ruang yang tertata				Kec		Kec		0		0		2 Kec		2.000.000.000		2 Kec		2.000.000.000		2 Kec		2.000.000.000		6 Kec		6.000.000.000			
	1 03 12 2.02 01		Kordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		0		0 Dok		0 Dok		0 Dok		0		2 Dok		1.000.000.000		2 Dok		1.000.000.000		2 Dok		1.000.000.000		6 Dok		3.000.000.000			
	1 03 12 2.02 02		Kordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				0 Dok		0 Dok		0		0		2 Dok		1.000.000.000		2 Dok		1.000.000.000		2 Dok		1.000.000.000		6 Dok		3.000.000.000			
	1 03 12 2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pemanfaatan ruang				0 Dok		0 Dok		1 Dok		166.810.000		200 Dok		100.000.000		200 Dok		100.000.000		200 Dok		100.000.000		800 Dok		466.810.000			
	1 03 12 2.03 01		Kordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				Dok		Dok		200 Dok		166.810.000		200 Dok		100.000.000		200 Dok		100.000.000		200 Dok		100.000.000		800 Dok		466.810.000			
	1 03 12 2.03 02		Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan																													
	1 03 12 2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan rauang daerah kabupaten / kota		terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang				0 Dok		0 Dok		6 Dok		266.119.636		6 Dok		1.000.000.000		6 Dok		1.000.000.000		6 Dok		1.000.000.000		24 Dok		3.266.119.636			
	1 03 12 2.04 04		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				Dok		Dok		6 Dok		266.119.636		6 Dok		1.000.000.000		6 Dok		1.000.000.000		6 Dok		1.000.000.000		24 Dok		3.266.119.636			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
<b>2.2 Presentase Penatagunaan Tanah</b>																									
RPJMD 2021-2026	2 10 10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Luas lahan bersertifikat	75 %	%					82 %	1.576.679.744	85 %	350.000.000	90 %	375.000.000	95 %	400.000.000	95 %	2.701.679.744	DPRKPKCK				
	2 10 10 2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sengketa tanah yang tertangani		Laporan	0		Laporan	0	100.000	Laporan 1.576.679.744	100.000	Laporan 1.000.000.000	100.000	Laporan 1.000.000.000	100.000	Laporan 1.000.000.000	400.000	Laporan 4.576.679.744					
	2 10 10 2.01 01		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Laporan			Laporan		100.000	Laporan 1.576.679.744	100.000	Laporan 1.000.000.000	100.000	Laporan 1.000.000.000	100.000	Laporan 1.000.000.000	400.000	Laporan 4.576.679.744					
<b>3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman yang Layak</b>																									
<b>3.1 Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Tertangani</b>																									
RPJMD 2021-2026	1 04 03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan perumahan yang memiliki lingkungan sehat dan aman didukung PSU	11 Perumahan	Perumahan					10 Perumahan	401.580.750	10 Perumahan	240.000.000	10 Perumahan	260.000.000	10 Perumahan	280.000.000	51 Perumahan	1.181.580.750	DPRKPKCK				
	1 04 03 2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan perumahan yang dikembangkan terintegrasi secara elektronik	3 kws	0 kws	0		0 kws	0	20 kws	254.236.250	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	83 kws	614.236.250					
	1 04 03 2.01 01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dok	Dok			Dok		20 Dok	254.236.250	20 Dok	120.000.000	20 Dok	120.000.000	20 Dok	120.000.000	83 Dok	614.236.250		Se-Kab Jember			
	1 04 03 2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		0 Laporan	0		0 Laporan	0	10 Laporan	147.344.500	10 Laporan	120.000.000	10 Laporan	120.000.000	10 Laporan	120.000.000	40 Laporan	507.344.500	DPRKPKCK	Se-Kab Jember			
	1 04 03 2.02 05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Laporan			Laporan		10 Laporan	147.344.500	10 Laporan	120.000.000	10 Laporan	120.000.000	10 Laporan	120.000.000	40 Laporan	507.344.500					
RPJMD 2021-2026	1 04 05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Terselenggaranya peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di lingkungan permukiman			0			0		55.951.461.932		39.203.958.000		41.037.082.000		41.390.301.000		177.582.802.932					
				Cakupan luasan lingkungan permukiman kumuh	1.324,25 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>			M <sup>2</sup>		178,03 M <sup>2</sup>	1.515.000.000	205,62 M <sup>2</sup>	1.515.000.000	406,50 M <sup>2</sup>	2.995.000.000	339,68 M <sup>2</sup>	2.995.000.000	0,00 M <sup>2</sup>	9.020.000.000	DPRKCK				
				Luas jalan lingkungan yang terbangun	708.334 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>			M <sup>2</sup>		145.000 M <sup>2</sup>	16.886.461.932	145.000 M <sup>2</sup>	138.958.000	145.000 M <sup>2</sup>	142.082.000	145.000 M <sup>2</sup>	145.301.000	1.288.334 M <sup>2</sup>	17.312.802.932	DPRKCK				
				Jumlah RTH yang terpelihara	8 RTH	RTH			RTH		8 RTH	6.500.000.000	8 RTH	6.500.000.000	8 RTH	6.500.000.000	8 RTH	6.500.000.000	8 RTH	6.500.000.000	8 RTH	26.000.000.000	DPRKCK		
				Luas pemakaman yang terpelihara	8 Ha	Ha			Ha		8 Ha	900.000.000	8 Ha	900.000.000	8 Ha	900.000.000	8 Ha	900.000.000	8 Ha	900.000.000	8 Ha	3.600.000.000	DPRKCK		
				Jumlah titik lampu PJU yang dibangun	23.368 Titik	Titik			Titik		1.000 Titik	17.000.000.000	1.000 Titik	17.000.000.000	1.000 Titik	17.000.000.000	1.000 Titik	17.000.000.000	1.000 Titik	17.000.000.000	1.000 Titik	68.000.000.000	DPRKCK		
				Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara	0 Titik	Titik			Titik		2.800 Titik	10.150.000.000	2.900 Titik	10.150.000.000	3.000 Titik	10.500.000.000	3.100 Titik	10.850.000.000	3.100 Titik	41.650.000.000	DPRKCK				
				Jumlah lokasi yang terelektifikasi	9 Lokasi	1 Lokasi			Titik		1 Lokasi	3.000.000.000	1 Lokasi	3.000.000.000	1 Lokasi	3.000.000.000	1 Lokasi	3.000.000.000	1 Lokasi	12.000.000.000	DPRKCK				
	1 04 05 2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase cakupan sarana dan prasarana yang didukung PSU	30 %	0 %			0 %		%	55.951.461.932	%	39.203.958.000	%	10.000.000.000	%	10.000.000.000	0 %	50.000.000.000					
	1 04 05 2.01 02		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang	31 lokasi	lokasi			31 lokasi		31 lokasi	55.951.461.932	31 lokasi	63.200.000.000	31 lokasi	63.300.000.000	31 lokasi	63.400.000.000	31 lokasi	298.981.404.616					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAN JALAN	Persentase peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	62 %	%	%	%	3 %	63.407.578.485	5 %	0	5 %	0	5 %	0	80 %	63.407.578.485					
				1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah luas jalan lingkungan di kawasan permukiman yang terbangun	708.334 m²	m²	0	m²	243.295 m²	63.407.578.485	0 m²	0	0 m²	0	0 m²	0	951.629 m²	63.407.578.485					
				1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	708.334 m²	m²		m²	243.295 m²	63.407.578.485	0 m²	0	0 m²	0	0 m²	0	951.629 m²	63.407.578.485					

### 3.2 Persentase Rumah Layak Huni

RPJMD 2021-2026	1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Unit rumah dalam permukiman layak huni	6.355 Unit	Unit		300 Unit	Unit		300 Unit	4.130.771.900	300 Unit	6.000.000.000	300 Unit	6.000.000.000	300 Unit	6.000.000.000	7.855 Unit	22.130.771.900	DPRKCK		
	1 04 03 2.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase rumah layak huni	55 %	%	0	%	0	%	57 %	4.130.771.900	58 %	6.000.000.000	59 %	6.000.000.000	60 %	6.000.000.000	60 %	22.130.771.900			
	1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	6.355 Unit Rumah	0 Jnit Rumah		0 Jnit Rumah			86 Jnit Rumah	4.130.771.900	300 Jnit Rumah	6.000.000.000	300 Jnit Rumah	6.000.000.000	300 Jnit Rumah	6.000.000.000	7.341 Unit Rumah	22.130.771.900			
			APBD																			
			DAK																			
			CSR	25	Unit		Unit															
			BSPS	965	Unit		Unit															
RPJMD 2021-2026	1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Unit rumah layak huni	38 Unit	Unit		Unit	Unit		10 Unit	355.735.000	100 Unit	5.500.000.000	100 Unit	5.500.000.000	100 Unit	5.500.000.000	348 Unit	16.855.735.000	DPRKCK		
	1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relokasi program Kabupaten	0 kws	0 kws	0	0 kws	0	0 kws	0	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	30 kws	750.000.000		
	1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan. Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program	0 dok	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	3 dok	600.000.000		
	1 04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	0 dok	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	30 dok	150.000.000		
	1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana /relokasi program kabupaten	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	10 Unit	355.735.000	100 Unit	4.000.000.000	100 Unit	4.000.000.000	100 Unit	4.000.000.000	310 Unit	9.355.735.000			
	1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten /Kota yang Terehabilitasi	0	0 Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	0	0	10 Unit Rumah	355.735.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	160 Unit Rumah	4.855.735.000			
	1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang	0	0 Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	0	0	50 Unit Rumah	1.500.000.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	150 Unit Rumah	4.500.000.000			
	1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang	0	0 Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	0	0	2 Unit Rumah	1.000.000.000	2 Unit Rumah	1.000.000.000	2 Unit Rumah	1.000.000.000	2 Unit Rumah	1.000.000.000	6 Unit Rumah				

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk Pemenuhan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

### Persentase Indikator Program yang tercapai

RUTIN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Indikator Program yang tercapai			0		0		49.967.125.954		53.040.327.417		51.740.327.417		51.740.327.417		206.488.108.205	DPRKCK	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dok	Dok	0	Dok	0	10 Dok	581.236.890	10 Dok	612.151.290	10 Dok	612.151.290	10 Dok	612.151.290	10 Dok	2.417.690.760		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok	Dok		Dok		10 Dok	581.236.890	10 Dok	612.151.290	10 Dok	612.151.290	10 Dok	612.151.290	50 Dok	2.417.690.760		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengadministrasian keuangan perangkat daerah sesuai dengan pedoman			0		0	9.933.754.841		10.978.836.564		10.978.836.564		10.978.836.564		42.870.264.533					
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	Orang/Bulan		Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	9.743.318.091	14 Orang/Bulan	10.294.899.854	14 Orang/Bulan	10.294.899.854	14 Orang/Bulan	10.294.899.854	14 Orang/Bulan	10.294.899.854	14 Orang/Bulan	40.628.017.653			
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	Dok		Dok	12 Dok	500.000.000	12 Dok	500.000.000	12 Dok	500.000.000	12 Dok	500.000.000	12 Dok	500.000.000	12 Dok	1.500.000.000			
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Laporan		Laporan	2 Laporan	17.955.500	2 Laporan	11.455.460	2 Laporan	11.455.460	2 Laporan	11.455.460	2 Laporan	11.455.460	8 Laporan	52.321.880			
					Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan																			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																			
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	24 Dok	Dok		Dok	24 Dok	172.481.250	24 Dok	172.481.250	24 Dok	172.481.250	24 Dok	172.481.250	24 Dok	172.481.250	24 Dok	689.925.000			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah			0		0	99.387.730		99.387.730		99.387.730		99.387.730		99.387.730		397.550.920			
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian																			
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Laporan		Laporan	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	397.550.920			
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik																			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya penyediaan barang dan jasa pada perangkat daerah</b>																			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	Paket		Paket	1 Paket	31.489.923	1 Paket	31.489.923	1 Paket	31.489.923	1 Paket	31.489.923	1 Paket	31.489.923		125.959.692			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Paket		Paket	1 Paket	837.367.525	1 Paket	837.367.525	1 Paket	837.367.525	1 Paket	837.367.525	1 Paket	837.367.525		3.349.470.100			
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga																0			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Paket		Paket	1 Paket	595.317.420	1 Paket	595.317.420	1 Paket	595.317.420	1 Paket	595.317.420	1 Paket	595.317.420		2.381.269.680			
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Paket		Paket	1 Paket	55.572.150	1 Paket	55.572.150	1 Paket	55.572.150	1 Paket	55.572.150	1 Paket	55.572.150		222.288.600			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																0			
					Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material																0			
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu																0			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		Laporan		Laporan	12 Laporan	333.840.000	12 Laporan	333.840.000	12 Laporan	333.840.000	12 Laporan	333.840.000	12 Laporan	333.840.000	48 Laporan	1.335.360.000			
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																0			
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada																0			
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>																			
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau																			
					Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar																			
					Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alet Angkutan Darat Tak Bermotor																			
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang																			
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya																			
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud																			
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>																			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Surat	Laporan		Laporan	12 Laporan	7.325.475	12 Laporan	7.325.475	12 Laporan	7.325.475	12 Laporan	7.325.475	12 Laporan	7.325.475		29.301.900			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Laporan		Laporan	12 Laporan	31.105.046.426	12 Laporan	31.802.251.766	12 Laporan	31.802.251.766	12 Laporan	31.802.251.766	12 Laporan	31.802.251.766		126.511.801.724			
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Laporan		Laporan	24 Laporan	188.500.089	24 Laporan	188.500.089	24 Laporan	188.500.089	24 Laporan	188.500.089	24 Laporan	188.500.089		754.000.356			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Laporan		Laporan	24 Laporan	3.149.029.516	24 Laporan	3.149.029.516	24 Laporan	3.149.029.516	24 Laporan	3.149.029.516	24 Laporan	3.149.029.516		12.596.118.064			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		0	3.049.257.969		3.049.257.969		3.049.257.969		3.049.257.969		12.197.031.876					
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Unit		Unit	1 Unit	87.752.128	1 Unit	87.752.128	1 Unit	87.752.128	1 Unit	87.752.128		351.008.512					
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit	Unit		Unit	63 Unit	2.393.578.535	63 Unit	2.393.578.535	63 Unit	2.393.578.535	63 Unit	2.393.578.535		9.574.314.140					
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			
					Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel																			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit		Unit	2 Unit	417.752.496	2 Unit	417.752.496	2 Unit	417.752.496	2 Unit	417.752.496	8 Unit	1.671.009.984					
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Lokasi	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	150.174.810	2 Lokasi	150.174.810	2 Lokasi	150.174.810	2 Lokasi	150.174.810		600.699.240					
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah																			

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER

224.810.931.772

-3.164.887.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
<b>TOTAL ANGGARAN</b>								0	0	221.646.044.772	175.694.285.417	176.756.409.417	177.686.628.417	751.783.368.023											
<b>1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk Pemenuhan Pelayanan Publik</b>																									
<b>1. Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar</b>																									
<b>1. Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi Layak, Kuantitas Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung yang Tertata</b>																									
<b>1.1 Persentase Bangunan Gedung yang sesuai dengan Standar Teknis</b>																									
<b>RPJMD 2021-2026</b>	1 03 08		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Bangunan berIMB per satuan bangunan	1.000 Unit	Unit					1.000 Unit	15.752.112.350	1.000 Unit	15.000.000.000	1.000 Unit	15.000.000.000	1.000 Unit	15.000.000.000	7.000 Unit	60.752.112.350	DPRKCK				
	1 03 08 2.01		Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah gedung negara terbangun dan yang ter rehabilitasi	31 gedung	gedung	0	gedung	0	26 gedung	15.752.112.350	10 gedung	19.500.000.000	10 gedung	19.500.000.000	10 gedung	19.500.000.000	56 gedung	86.941.211.790						
	1 03 08 2.01 01		Penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), Sertifikat laik fungsi (SLF), Peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), Pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	18.133 Dok	dok		dok		1.000 dok	784.346.110	1.000 dok	15.000.000.000	1.000 dok	15.000.000.000	1.000 dok	15.000.000.000	1.000 dok	45.784.346.110						
	1 03 08 2.01 02		Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	31	dok		dok		26 dok	666.000.000	10 dok	2.000.000.000	10 dok	2.000.000.000	10 dok	2.000.000.000	87 dok	21.225.973.600						
	1 03 08 2.01 05		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		Dok		Dok		1 dok	370.874.160	1 dok	500.000.000	1 dok	500.000.000	1 dok	500.000.000	4 dok							
	1 03 08 2.01 13		Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	31	Unit		Unit		26 Unit	13.930.892.080	10 Unit	2.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	87 Unit	19.930.892.080						
<b>RPJMD 2021-2026</b>	1 03 11		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI</b>				0		0	0	0			20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000	DPRKCK				
			Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi		0 Pelatihan	Pelatihan		Pelatihan		10 Pelatihan	10.000.000	10 Pelatihan	10.000.000	10 Pelatihan	10.000.000	10 Pelatihan	10.000.000	30 Pelatihan	30.000.000	DPRKCK					
			Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah		0 Sistem	Sistem		Sistem		10 Sistem	10.000.000	10 Sistem	10.000.000	10 Sistem	10.000.000	10 Sistem	10.000.000	30 Sistem	30.000.000	DPRKCK					
	1 03 11 2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih		0 orang	0	orang	0	0 orang		1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	3 orang	60.000.000						
	1 03 11 2.01 06		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan		0 orang	0	orang	0	0 orang		1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	3 orang	60.000.000						
	1 03 11 2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara kabupaten		0 Dok	0	Dok	0	0 Dok		1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	300.000.000						
	1 03 11 2.02 02		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		0 Dok	0	Dok	0	0 Dok		1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	300.000.000						

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
<b>1.2 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum</b>																									
RPJMD 2021-2026	1 03 03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penduduk yang memiliki akses air minum	71,36 %	100 %		100 %		100 %	10.111.209.797	100 %	20.000.000.000	100 %	20.000.000.000	100 %	20.000.000.000	100 %	20.000.000.000	100 %	70.111.209.797	DPRKCK			
	1 03 03 2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang mendapatkan layanan air minum	280.599 SR	SR	0	SR	0	200 SR	10.111.209.797	200 SR	26.615.309.912	200 SR	26.615.309.912	200 SR	26.615.309.912	200 SR	26.615.309.912	281.399 SR	89.957.139.533				
	1 03 03 2.01 03		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun		0 Liter/De tik	0	0 Liter/De tik	0	1.000 Liter/De tik	249.785.700	1.000 Liter/De tik	1.150.000.000	1.000 Liter/De tik	1.150.000.000	1.000 Liter/De tik	1.150.000.000	1.000 Liter/De tik	1.150.000.000	4.000 Liter/De tik	3.699.785.700				
	1 03 03 2.01 04		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perdesasaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat		SR		lokasi		90 SR	1.130.041.201	600 SR	13.021.491.260	600 SR	13.021.491.260	600 SR	13.021.491.260	600 SR	13.021.491.260	1.890 SR	40.194.514.981				
	1 03 03 2.01 06		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesasaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang air bersih pada kawasan Perdesasaan								1.000 SR	5.000.000.000	1.000 SR	5.000.000.000	1.000 SR	5.000.000.000	1.000 SR	5.000.000.000	3.000 SR	15.000.000.000				
	1 03 03 2.01 07		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		0 SR		0 SR		70 SR	809.918.960	100 SR	550.000.000	100 SR	550.000.000	100 SR	550.000.000	100 SR	550.000.000	370 lokasi	2.459.918.960				
	1 03 03 2.01 11		Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi		1 kelompok		kelompok		15 kelompok	191.828.400	15 kelompok	1.500.000.000	15 kelompok	1.500.000.000	15 kelompok	1.500.000.000	15 kelompok	1.500.000.000	60 kelompok	4.691.828.400				
	1 03 03 2.01 19		Pertuasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesasaan	Jumlah jaringan Sistem Penyediaan Air Minum yang diperluas di kawasan Perdesasaan				lokasi		15 lokasi	7.729.635.536	15 lokasi	5.393.818.652	15 lokasi	5.393.818.652	15 lokasi	5.393.818.652	15 lokasi	5.393.818.652	60 lokasi	23.911.091.492				
<b>1.3 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Aman</b>																									
RPJMD 2021-2026	1 03 05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	76,25 %	%		%		100 %	18.770.771.656	100 %	30.000.000.000	100 %	30.000.000.000	100 %	30.000.000.000	100 %	30.000.000.000	100 %	108.770.771.656	DPRKCK			
	1 03 05 2.01		Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SR dengan sanitasi layak	300.359 SR	SR	0	SR	0	200 SR	18.770.771.656	200 SR	30.000.000.000	200 SR	30.000.000.000	200 SR	30.000.000.000	200 SR	30.000.000.000	301.159 SR	108.770.771.656				
	1 03 05 2.01 06		Pembangunan atau penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik							15.999.820.000		24.000.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000						
				1. Jumlah MCK yang terbangun	86 Lokasi	1 lokasi		1 lokasi		30 lokasi		45 lokasi	9.000.000.000	45 lokasi	9.000.000.000	45 lokasi	9.000.000.000	45 lokasi	9.000.000.000	252 lokasi	27.000.000.000				
				2. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki	2.064 Unit	Unit		Unit		800 Unit		1.500 Unit	15.000.000.000	1.500 Unit	15.000.000.000	1.500 Unit	15.000.000.000	1.500 Unit	15.000.000.000	7.364 Unit	45.000.000.000				
	1 03 05 2.01 10		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara		0 Lokasi		0 Lokasi				1 Lokasi	5.000.000.000	1 Lokasi	5.000.000.000	1 Lokasi	5.000.000.000	1 Lokasi	5.000.000.000	1 Lokasi	15.000.000.000				
	1 03 05 2.01 15		Pembangunan /penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun		M3/Hari		M3/Hari		28 M3/Hari	2.770.951.656	28 M3/Hari	1.000.000.000	28 M3/Hari	1.000.000.000	28 M3/Hari	1.000.000.000	28 M3/Hari	1.000.000.000	112 M3/Hari	5.770.951.656				
	1 03 06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase peningkatan drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	32 %					7 %	47.696.948										47.696.948				
	1 03 06 2 01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di lingkungan permukiman							47.696.948		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		1.547.696.948				
	1 03 06 2 01 12		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun						100 Meter	47.696.948	1.000 Meter	500.000.000	1.000 Meter	500.000.000	1.000 Meter	500.000.000	1.000 Meter	500.000.000		1.547.696.948				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
<b>2.Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkelanjutan</b>																										
<b>2.1 Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang</b>																										
RPJMD 2021-2026	1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terselenggaranya penyusunan dokumen rencana tata ruang dan					0		0		1.173.320.256		6.340.000.000		6.824.000.000		7.356.000.000		21.693.320.256						
			Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	1	Dok	Dok			Dok		5	Dok	5	Dok	1.500.000.000	5	Dok	1.500.000.000	6	Dok	1.500.000.000	21	Dok	4.500.000.000	DPRKCK	
			Jumlah kecamatan yang telah memiliki rencana detail tata ruang	3	Kec	Kec			Kec		5	Kec	5	Kec	4.840.000.000	5	Kec	5.324.000.000	6	Kec	5.856.000.000	29	Kec	16.020.000.000	DPRKCK	
	1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten					0		0		740.390.620														
	1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			Dok			Dok		1	Dok	2	Dok	1.000.000.000	2	Dok	1.000.000.000	0	Dok	0	5	Dok			
	1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			Dok			Dok		1	Dok	2	Dok	1.000.000.000	2	Dok	1.000.000.000	0	Dok	0	5	Dok			
	1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang			Dok			Dok		1	Dok	1	Dok	340.000.000	1	Dok	824.000.000	1	Dok	356.000.000	4	Dok			
	1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang tertata			Kec		0		Kec	0		2	Kec	2.000.000.000	2	Kec	2.000.000.000	2	Kec	2.000.000.000	6	Kec	6.000.000.000		
	1 03 12 2.02 01	Kordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	0	0	Dok	0	0	0	0	0	0	2	Dok	1.000.000.000	2	Dok	1.000.000.000	2	Dok	1.000.000.000	6	Dok	3.000.000.000		
	1 03 12 2.02 02	Kordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0		2	Dok	1.000.000.000	2	Dok	1.000.000.000	2	Dok	1.000.000.000	6	Dok	3.000.000.000		
	1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang			0	0	0	0	0	1	Dok	166.810.000	200	Dok	100.000.000	200	Dok	100.000.000	200	Dok	100.000.000	800	Dok	466.810.000	
	1 03 12 2.03 01	Kordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			Dok			Dok		200	Dok	166.810.000	200	Dok	100.000.000	200	Dok	100.000.000	200	Dok	100.000.000	800	Dok	466.810.000	
	1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan																							
	1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten / kota	terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang			0	0	0	0	0	6	Dok	266.119.636	6	Dok	1.000.000.000	6	Dok	1.000.000.000	6	Dok	1.000.000.000	6	Dok	3.266.119.636	
	1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Dok			Dok		6	Dok	266.119.636	6	Dok	1.000.000.000	6	Dok	1.000.000.000	6	Dok	1.000.000.000	6	Dok	3.266.119.636	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
<b>2.2 Presentase Penatagunaan Tanah</b>																											
RPJMD 2021-2026	2 10 10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Luas lahan bersertifikat		75 %					82 %	1.576.679.744	85 %	350.000.000	90 %	375.000.000	95 %	400.000.000	95 %	2.701.679.744	DPRKPKC					
	2 10 10 2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah sengketa tanah yang tertangani		Laporan	0	Laporan	0	100.000	Laporan	1.576.679.744	100.000	Laporan	1.000.000.000	100.000	Laporan	1.000.000.000	100.000	Laporan	1.000.000.000	400.000	Laporan	4.576.679.744		
	2 10 10 2.01 01		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Laporan		Laporan		100.000	Laporan	1.576.679.744	100.000	Laporan	1.000.000.000	100.000	Laporan	1.000.000.000	100.000	Laporan	1.000.000.000	400.000	Laporan	4.576.679.744		
<b>3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman yang Layak</b>																											
<b>3.1 Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Tertangani</b>																											
RPJMD 2021-2026	1 04 03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Cakupan perumahan yang memiliki lingkungan sehat dan aman didukung PSU		11 Perumahan					10 Perumahan	401.580.750	10 Perumahan	240.000.000	10 Perumahan	260.000.000	10 Perumahan	280.000.000	51 Perumahan	1.181.580.750	DPRKPKC					
	1 04 03 2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah kawasan perumahan yang dikembangkan terintegrasi secara elektronik		3 kws	0 kws	0	0	0	20 kws	254.236.250	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	83 kws	614.236.250						
	1 04 03 2.01 01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik		3 Dok	Dok				20 Dok	254.236.250	20 Dok	120.000.000	20 Dok	120.000.000	20 Dok	120.000.000	83 Dok	614.236.250		Se-Kab Jember				
	1 04 03 2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha		Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		0 Laporan	0	0	0	0	10 Laporan	147.344.500	10 Laporan	120.000.000	10 Laporan	120.000.000	10 Laporan	120.000.000	40 Laporan	507.344.500	DPRKPKC	Se-Kab Jember				
	1 04 03 2.02 05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Laporan		Laporan		10 Laporan	147.344.500	10 Laporan	120.000.000	10 Laporan	120.000.000	10 Laporan	120.000.000	40 Laporan	507.344.500							
RPJMD 2021-2026	1 04 05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Terselenggaranya peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di lingkungan permukiman				0		0		55.951.461.932		39.203.958.000		41.037.082.000		41.390.301.000		177.582.802.932						
					Cakupan luasan lingkungan permukiman kumuh		1.324,25 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>		M <sup>2</sup>		178,03 M <sup>2</sup>	1.515.000.000	205,62 M <sup>2</sup>	1.515.000.000	406,50 M <sup>2</sup>	2.995.000.000	339,68 M <sup>2</sup>	2.995.000.000	0,00 M <sup>2</sup>	9.020.000.000	DPRKCK					
					Luas jalan lingkungan yang terbangun		708.334 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>		M <sup>2</sup>		145.000 M <sup>2</sup>	16.886.461.932	145.000 M <sup>2</sup>	138.958.000	145.000 M <sup>2</sup>	142.082.000	145.000 M <sup>2</sup>	145.301.000	1.288.334 M <sup>2</sup>	17.312.802.932	DPRKCK					
					Jumlah RTH yang terpelihara		8 RTH	RTH		RTH		8 RTH	6.500.000.000	8 RTH	6.500.000.000	8 RTH	6.500.000.000	8 RTH	6.500.000.000	8 RTH	26.000.000.000	DPRKCK					
					Luas pemakaman yang terpelihara		8 Ha	Ha		Ha		8 Ha	900.000.000	8 Ha	900.000.000	8 Ha	900.000.000	8 Ha	900.000.000	8 Ha	3.600.000.000	DPRKCK					
					Jumlah titik lampu PJU yang dibangun		23.368 Titik	Titik		Titik		1.000 Titik	17.000.000.000	1.000 Titik	17.000.000.000	1.000 Titik	17.000.000.000	1.000 Titik	17.000.000.000	1.000 Titik	68.000.000.000	DPRKCK					
					Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara		0 Titik	Titik		Titik		2.800 Titik	10.150.000.000	2.900 Titik	10.150.000.000	3.000 Titik	10.500.000.000	3.100 Titik	10.850.000.000	3.100 Titik	41.650.000.000	DPRKCK					
					Jumlah lokasi yang terelektifikasi		9 Lokasi	1 Lokasi		Titik		1 Lokasi	3.000.000.000	1 Lokasi	3.000.000.000	1 Lokasi	3.000.000.000	1 Lokasi	3.000.000.000	1 Lokasi	12.000.000.000	DPRKCK					
	1 04 05 2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Persentase cakupan sarana dan prasarana yang didukung PSU		30 %	0 %		%		178 %	55.951.461.932	206 %	39.203.958.000	407 %	10.000.000.000	340 %	10.000.000.000	0 %	50.000.000.000						
	1 04 05 2.01 02		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang		31 lokasi	lokasi		lokasi		31 lokasi	55.951.461.932	31 lokasi	63.200.000.000	31 lokasi	63.300.000.000	31 lokasi	63.400.000.000	31 lokasi	298.981.404.616						

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	62 %	%	%	%	3 %	63.407.578.485	5 %	0	5 %	0	5 %	0	80 %	63.407.578.485					
				1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah luas jalan lingkungan di kawasan permukiman yang terbangun	708.334 m²	m²	0	m²	0	243.295 m²	63.407.578.485	0 m²	0	0 m²	0	0 m²	0	951.629 m²	63.407.578.485				
				1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	708.334 m²	m²		m²		243.295 m²	63.407.578.485	0 m²	0	0 m²	0	0 m²	0	951.629 m²	63.407.578.485				

### 3.2 Persentase Rumah Layak Huni

RPJMD 2021-2026	1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Unit rumah dalam permukiman layak huni	6.355 Unit	Unit	300 Unit	Unit	300 Unit	4.130.771.900	300 Unit	6.000.000.000	300 Unit	6.000.000.000	300 Unit	6.000.000.000	7.855 Unit	22.130.771.900	DPRKCK		
	1 04 03 2.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase rumah layak huni	55 %	%	0	%	0	4.130.771.900	57 %	6.000.000.000	58 %	6.000.000.000	59 %	6.000.000.000	60 %	6.000.000.000	60 %	22.130.771.900	
	1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	6.355 Unit Rumah	0 Jnit Rumah	0 Jnit Rumah	0 Jnit Rumah	86 Jnit Ruma	4.130.771.900	300 Unit Ruma	6.000.000.000	300 Unit Ruma	6.000.000.000	300 Jnit Ruma	6.000.000.000	7.341 Jnit Ruma	22.130.771.900			
			APBD																	
			DAK																	
			CSR	25	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	
			BSPS	965	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	
RPJMD 2021-2026	1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Unit rumah layak huni	38 Unit	Unit	Unit	Unit	10 Unit	355.735.000	100 Unit	5.500.000.000	100 Unit	5.500.000.000	100 Unit	5.500.000.000	348 Unit	16.855.735.000	DPRKCK		
	1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relokasi program Kabupaten	0 kws	0 kws	0	0 kws	0	0 kws	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	30 kws	750.000.000			
	1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan. Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program	0 dok	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	3 dok	600.000.000			
	1 04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	0 dok	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	30 dok	150.000.000			
	1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana /relokasi program kabupaten	0	0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	355.735.000	4.000.000.000	100 Unit	4.000.000.000	100 Unit	4.000.000.000	310 Unit	9.355.735.000			
	1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten /Kota yang Terehabilitasi	0	0 Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	10 Unit Rumah	355.735.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	160 Unit Rumah	4.855.735.000			
	1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang	0	0 Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	50 Unit Rumah	1.500.000.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	150 Unit Rumah	4.500.000.000			
	1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang	0	0 Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	2 Unit Rumah	1.000.000.000	2 Unit Rumah	1.000.000.000	2 Unit Rumah	1.000.000.000	6 Unit Rumah				

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk Pemenuhan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

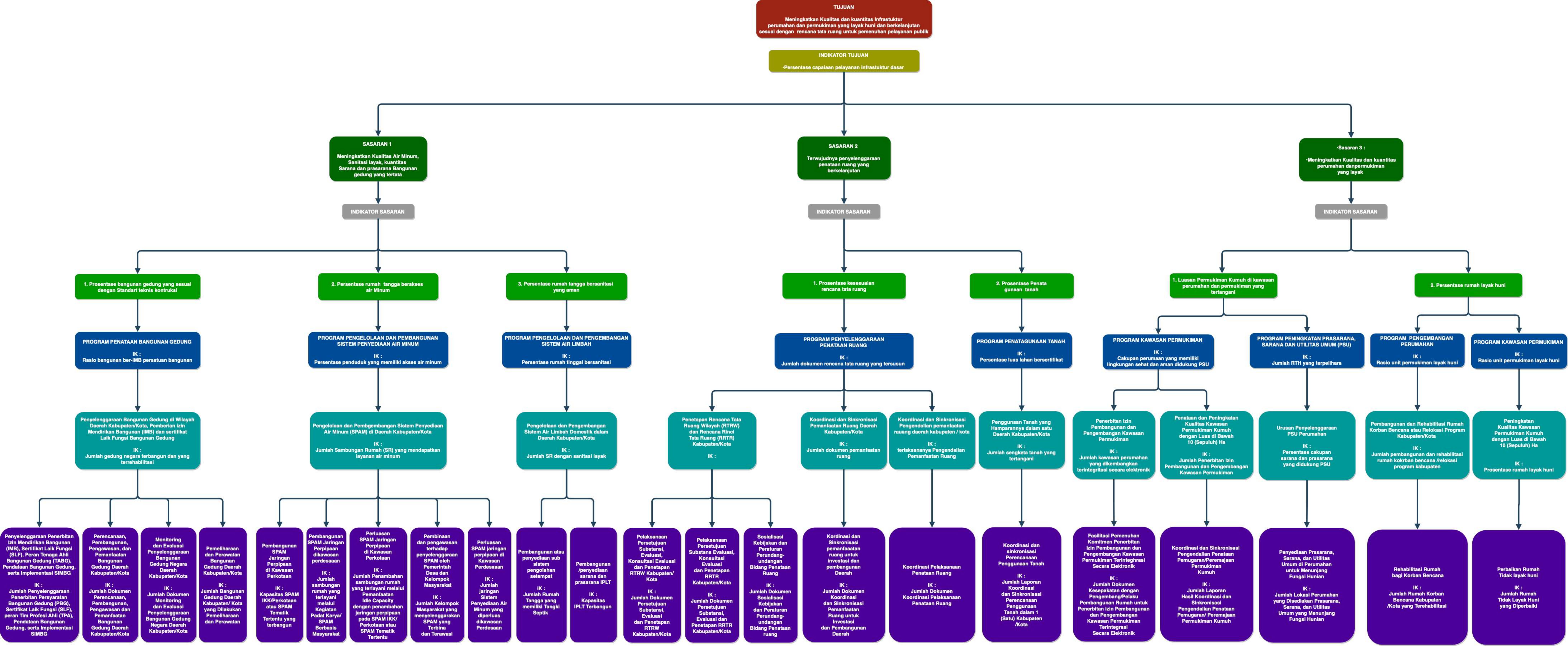
Persentase Indikator Program yang tercapai

RUTIN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Indikator Program yang tercapai	0	0	0	0	49.967.125.954	53.040.327.417	51.740.327.417	51.740.327.417	206.488.108.205	DPRKCK						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dok	Dok	0	Dok	0	10 Dok	581.236.890	10 Dok	612.151.290	10 Dok	612.151.290	10 Dok	612.151.290	10 Dok	2.417.690.760	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok	Dok		Dok	10 Dok	581.236.890	10 Dok	612.151.290	10 Dok	612.151.290	10 Dok	612.151.290	50 Dok	2.417.690.760		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengadministrasian keuangan perangkat daerah sesuai dengan pedoman			0		0	9.933.754.841		10.978.836.564		10.978.836.564		10.978.836.564		42.870.264.533					
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	Orang/Bulan		Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	9.743.318.091	14 Orang/Bulan	10.294.899.854	14 Orang/Bulan	10.294.899.854	14 Orang/Bulan	10.294.899.854	14 Orang/Bulan	10.294.899.854	14 Orang/Bulan	40.628.017.653			
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	Dok		Dok	12 Dok		12 Dok	500.000.000	12 Dok	500.000.000	12 Dok	500.000.000	12 Dok	500.000.000	12 Dok	1.500.000.000			
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Laporan		Laporan	2 Laporan	17.955.500	2 Laporan	11.455.460	2 Laporan	11.455.460	2 Laporan	11.455.460	2 Laporan	11.455.460	8 Laporan	52.321.880			
					Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan																			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																			
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	24 Dok	Dok		Dok	24 Dok	172.481.250	24 Dok	172.481.250	24 Dok	172.481.250	24 Dok	172.481.250	24 Dok	172.481.250	24 Dok	689.925.000			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah			0		0	99.387.730		99.387.730		99.387.730		99.387.730		99.387.730		397.550.920			
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian																			
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Laporan		Laporan	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	397.550.920			
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik																			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyediaan barang dan jasa pada perangkat daerah			0		0		1.853.587.018		1.853.587.018		1.853.587.018		1.853.587.018		7.414.348.072				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	Paket		Paket		1 Paket	31.489.923	1 Paket	31.489.923	1 Paket	31.489.923	1 Paket	31.489.923		125.959.692				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Paket		Paket		1 Paket	837.367.525	1 Paket	837.367.525	1 Paket	837.367.525	1 Paket	837.367.525		3.349.470.100				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga															0				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Paket		Paket		1 Paket	595.317.420	1 Paket	595.317.420	1 Paket	595.317.420	1 Paket	595.317.420		2.381.269.680				
					Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Paket		Paket		1 Paket	55.572.150	1 Paket	55.572.150	1 Paket	55.572.150	1 Paket	55.572.150		222.288.600				
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															0				
					Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material															0				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu															0				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	Laporan		Laporan		12 Laporan	333.840.000	12 Laporan	333.840.000	12 Laporan	333.840.000	12 Laporan	333.840.000	48 Laporan	1.335.360.000				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip															0				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada															0				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan									1.300.000.000						1.300.000.000				
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								1 Unit	700.000.000						2 Unit	700.000.000			
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau								1 Unit	500.000.000						2 Unit	500.000.000			
					Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar																			
					Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang								1 Unit	100.000.000										
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya																			
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud																			
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			0		0		34.449.901.506		35.147.106.846		35.147.106.846		35.147.106.846		139.891.222.044				
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Surat	Laporan		Laporan		12 Laporan	7.325.475	12 Laporan	7.325.475	12 Laporan	7.325.475	12 Laporan	7.325.475		29.301.900				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Laporan		Laporan		12 Laporan	31.105.046.426	12 Laporan	31.802.251.766	12 Laporan	31.802.251.766	12 Laporan	31.802.251.766		126.511.801.724				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Laporan		Laporan		24 Laporan	188.500.089	24 Laporan	188.500.089	24 Laporan	188.500.089	24 Laporan	188.500.089		754.000.356				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Laporan		Laporan		24 Laporan	3.149.029.516	24 Laporan	3.149.029.516	24 Laporan	3.149.029.516	24 Laporan	3.149.029.516		12.596.118.064				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			0		0		3.049.257.969		3.049.257.969		3.049.257.969		3.049.257.969		12.197.031.876				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Unit		Unit		1 Unit	87.752.128	1 Unit	87.752.128	1 Unit	87.752.128	1 Unit	87.752.128		351.008.512				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit	Unit		Unit		63 Unit	2.393.578.535	63 Unit	2.393.578.535	63 Unit	2.393.578.535	63 Unit	2.393.578.535		9.574.314.140				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			
					Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel																			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit		Unit		2 Unit	417.752.496	2 Unit	417.752.496	2 Unit	417.752.496	2 Unit	417.752.496	8 Unit	1.671.009.984				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Lokasi	Lokasi		Lokasi		2 Lokasi	150.174.810	2 Lokasi	150.174.810	2 Lokasi	150.174.810	2 Lokasi	150.174.810		600.699.240				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah																			





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

Jln. Srikoyo 1 No. 1 ☎. ( 0331 ) 425786 J E M B E R - 68111

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2024**

**Nama OPD/Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya  
Kabupaten Jember**

**RPJMD**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan RPJMD</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semuawilayah Jember	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata serta Berperspektif Kebencanaan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase rumah layak huni</li><li>2. Luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang tertangani</li><li>3. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak</li><li>4. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman</li><li>5. Persentase kesesuaian rencana tata ruang</li><li>6. Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang</li><li>7. Luasan ruang terbuka hijau publik</li><li>8. Persentase luas lahan bersertifikat</li></ol>

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase capaian pelayanan infrastuktur dasar	1. Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1.1 Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	97%	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	1.000 Rasio				
					Kegiatan Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	10 Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	5 Gedung	10.446.700.000
								Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim	1000 Dokumen	1.703.602.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
			1.2 Persentase rumah tangga berakses air Minum	84%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum	100%				
					Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang mendapatkan layanan air minum	200 SR	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	250 Liter/D etik	4.182.049.697

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Kabupaten/Kota			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kelompok masyarakat Pengelola SPAM yang Mandiri	20 Kelompok	452.112.796
								Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20 Liter/De- tik	725.000.000
								Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	70 SR	3.521.161.163

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
			1.3 Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	86%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	100%				
					Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SR dengan sanitasi layak	200 SR	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	40.000.000
								Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1 Rumah tangga	371.230.000
								Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Pembangunan Jamban dan MCK	400 Unit	8.155.698.170
		2.Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	2.1 Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	91%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	5 Dokumen				

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	721.107.110
					Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang	200 Dokumen ITR	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	200 Dokumen	150.153.950
					Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten / kota	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	6 Rapat	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	6 Dokumen	90.359.710
			2.2 Prosentase Prosentase Penatagunaan tanah	64%	Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	82%				

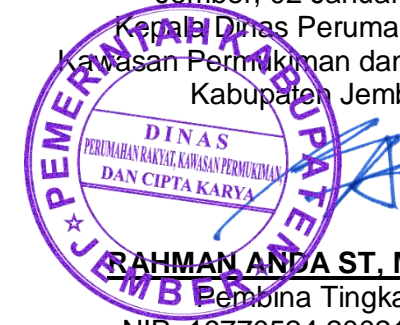
TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah yang tertangani	100.000 Bidang Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	86.929.230
		3. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	3.1 Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	150,8ha	Program Kawasan Permukiman	Cakupan perumahan yang memiliki lingkungan sehat dan aman didukung PSU	1.000 Unit				

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan perumahan yang dikembangkan terintegrasi secara elektronik	20 kws	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terinteghrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	255.667.095
					Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	10 kws	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	10 Laporan	664.739.905

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase sarana dan prasarana utilitas umum yang terbangun	5 %				
					Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana utilitas umum yang terbangun	31 Lokasi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	31 Lokasi	103.847.775.816
			3.2 Persentase rumah layak huni	92%	Program Kawasan Permukiman	Rasio unit permukiman layak huni	300 Unit				
					Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase rumah layak huni	58%	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	150 Unit Rumah	4.550.000.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Program Pengembangan Perumahan	Rasio unit permukiman layak huni	100 kws				
					Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana /relokasi program kabupaten	20 Unit Rumah	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit Rumah	500.000.000

Jember, 02 Januari 2024  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  
Kabupaten Jember



**RAHMAN ANDA ST, MT, M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770524 200212 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

Jln. Srikoyo 1 No. 1 ☎. ( 0331 ) 425786 JEMBER - 68111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAN ANDA, ST, MT, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN JEMBER**



**RAHMAN ANDA, ST, MT, M.Si.**  
NIP. 19770524 200212 1 008

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER**



**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA  
KARYA KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	➤ Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	97 %
		➤ Persentase rumah tangga berakses air Minum	84 %
		➤ Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	86 %
2.	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	➤ Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	91 %
		➤ Prosentase Penatagunaan tanah	64 %
3.	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	➤ Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	150,8 ha
		➤ Persentase rumah layak huni	92 %
		➤ Peringkat/Juara dalam Penyediaan Perumahan dari Direksi Teknis Pengawas Lapangan dan Percepatan Aset PSU	1 Penghargaan

<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	63.580.347.272,-	APBD
2. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	8.880.323.656,-	APBD
3. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	8.566.928.170,-	APBD
4. Penataan Bangunan Gedung	Rp.	12.150.302.000,-	APBD
5. Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	961.620.770,-	APBD
6. Pengembangan Perumahan	Rp.	500.000.000,-	APBD
7. Kawasan Permukiman	Rp.	5.470.407.000,-	APBD
8. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.	103.847.775.816,-	APBD
9. Penatagunaan Tanah	Rp.	86.929.230,-	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>204.044.633.914,-</b>	

Pihak Kedua  
BUPATI JEMBER



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**  
**KABUPATEN JEMBER**



**RAHMAN ANDA, ST, MT, M.Si.**  
NIP. 19770524 200212 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**  
JL. SRIKOYO I NO. 1 ☎ (0331) 425786 JEMBER - 68111

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/205/35.09.313/2024**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 26 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN JEMBER



**RAHMAN ANDA ST.,M.Si**

Pembina

NIP. 19770524 200212 1 008

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
- Tugas : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah kabupaten dan perumusan kebijakan pengelolaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program tata ruang dan pertanahan,
  - b. Pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung
  - c. Pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman
  - d. Pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan permukiman
  - e. Pembinaan dan pengendalian terhadap penerangan jalan umum
- Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik
- Indikator Tujuan : 1. Persentase capaian pelayanan infrastuktur dasar

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KAB. JEMBER  
TAHUN 2024**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi (jumlah bangunan yang sudah ber PBG dan SLF)}}{\text{Jumlah Bangunan Gedung yang mengajukan izin PBG dan SLF}} \times 100$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>1. Standar teknis konstruksi adalah serangkaian pedoman dan ketentuan teknis yang digunakan untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan konstruksi dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan fungsi bangunan atau infrastruktur yang direncanakan. Standar ini mencakup aspek keselamatan, kualitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Standar teknis konstruksi diatur dalam</p>	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Data Register Bangunan gedung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung</p> <p>2. PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PBG diterbitkan berdasarkan <b>pemenuhan standar teknis bangunan gedung</b> dan kesesuaian dengan <b>rencana tata ruang</b>.</p> <p>3. SLF adalah sertifikat laik fungsi. pemenuhan <b>sertifikat laik fungsi (SLF)</b> setelah konstruksi selesai sebagai bukti bahwa bangunan memenuhi standar Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p>		
		2. Persentase rumah tangga berakses air Minum	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki sarana air minum}}{\text{Jumlah KK di Kab Jember}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p>	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KK yang memiliki sarana air minum adalah KK yang dapat mengkases air minum melalui sarana langsung di Rumah. Berpedoman pada permenpupr No. 13 Tahun 2023.</li> <li>2. Sarana air minum meliputi semua infrastruktur, peralatan dan sistem yang digunakan untuk menyediakan air minum yang layak dan aman kepada masyarakat. Sarana air minum meliputi: Sumber air, instalasi pengelolaan air, sistem distribusi jaringan pipa, pompa air, bangunan dan struktur yang digunakan untuk mendukung pengelolaan instalasi air, tengki penyimpanan dan infrastruktur lainnya.</li> </ol>		
		3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Jumlah KK bersanitasi layak}}{\text{Jumlah KK penduduk Jember}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KK yang bersanitasi layak adalah KK yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air</li> </ol>	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat.</p> <p>2. Adapun kriteria sanitasi layak yaitu : Jamban sehat harus tertutup dinding dan atap, Saluran pembuangan air kotor yang ada di dapur atau tempat cuci dialirkan menuju selokan atau saluran kota, Saluran pembuangan air dari kloset langsung dialirkan menuju septic tank, Posisi septic tank harus lebih rendah dari kloset agar kotoran mudah masuk ke dalamnya. Selain itu memiliki saluran udara agar septic tank tidak meledak.</p> <p>3. Berpedoman pada permenpupr No. 13 Tahun 2023.</p>		
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Tata Ruang Wilayah}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas</p>	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Berpedoman pada Perda RTRW Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember.</li> <li>3. Realisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merujuk pada implementasi atau pelaksanaan rencana tata ruang yang telah disusun oleh pemerintah daerah</li> </ol>		
		2. Persentase Penatagunaan Tanah	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Jumlah sertifikat hak milik (SHM)}}{\text{Jumlah bidang Tanah}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan penuh atas tanah dan/atau bangunan. Di dalam SHM, terdapat keterangan nama pemilik, luas tanah, lokasi properti, gambar bentuk tanah, nama objek atau tetangga pemilik tanah yang</li> </ol>	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>berbatasan langsung, tanggal penetapan sertifikat, nama dan tanda tangan pejabat yang bertugas, serta cap stempel sebagai bukti keabsahan sertifikat.</p> <p>2. SHM hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.</p>		
3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1 Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> <p>Jumlah Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertangani</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat</li> <li>2. Perumahan dan permukiman kumuh yang tertangani adalah perumahan yang sudah meningkat kualitas fungsi sebagai tempat hunian.</li> </ol> <p>Berpedoman pada Permen PUPR No. 14 /PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Jasa Konstruksi , Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan</li> <li>2. Bidang Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum</li> </ol>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2 Persentase rumah layak huni	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak huni}}{\text{Jumlah bangunan Rumah}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.</li> <li>2. Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yakni : Keselamatan bangunan meliputi: struktur bawah/pondasi; struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas. Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi. Kecukupan luas minimum 7,2 m<sup>2</sup> – 12 m<sup>2</sup> /orang.</li> <li>3. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Perumahan dan Permukiman.</li> </ol>	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya